

**STUDI ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 19 TAHUN 2018 PASAL 11 TENTANG PENGHAPUSAN  
BATAS USIA *BÂLIGH* SEBAGAI SYARAT WALI  
DALAM PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

**Ahmad Nafii Ihsan**  
**(1502016086)**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2019**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 eksemplar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada, Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya  
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nafii Ihsan  
NIM : 1502016086  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : "Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama  
Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan  
Batas Usia *Bâligh* Sebagai Syarat Wali Dalam  
Pernikahan"

Dengan ini, kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 9 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin M.A., Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1 002

Dr. Hi. Naili Anafah, S.Hi. Mag.  
NIP.19810622 200804 2 022



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : AHMAD NAFII IHSAN  
NIM : 1502016086  
Judul : Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama  
Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan  
Batasusia *Bāligh* Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan

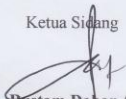
Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus  
dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 15 Oktober 2019 dan dapat  
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik  
2018/2019.

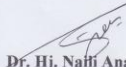
Semarang, 18 Oktober 2019


Dewan Penguji

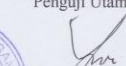
Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.  
NIP. 196907231998031005  
Penguji Utama

  
Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.  
NIP. 19810622 200804 2 022  
Penguji Utama

  
Dr. Junaidi Abdillah, M.Si  
NIP. 19790202 200912 1 001  
Pembimbing I

  
Yunita Dewi Septiana, M.Ag  
NIP. 197606272005012003  
Pembimbing II

  
Drs. H. Abu Hapsin M.A. Ph.D.  
NIP. 19590606 198903 1 002

  
Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag  
NIP. 19810622 200804 2 022

## Motto

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. An – Nur : 59)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Muya Allah, atas segala kekuatan. Rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga didalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua penulis Bapak (Sururi) dan Ibu (Nurhidayah) yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Adik yang membanggakan penulis (Maulana Abdul Aziz) yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga besar Bani Romhudi yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.
4. Keluarga besar Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an yang selalu member nasehat-nasehat yang baik dan slalu memberikan mensupport positif
5. Bapak ibu dosen yang senantiasa membimbing, mendidik, dan membuka wawasan ilmu kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa Beliau semua diterima oleh AllahSWT.
6. Untuk yang akan menjadi pendampingku kelak

#### DEKLARASI

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 8 oktober

Deklarator,



Muhammad Nafii Ihsan  
NIM.1502016086

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

## 2. Vokal pendek

ا = a	كَتَبَ	kataba
ي = i	سُئِلَ	su'ila
أ = u	يَذْهَبُ	yaz habu

## 3. Vokal panjang

آ = â	بَالِغٌ	bâligh
ي = î	قِيلَ	qîla
أ = û	يَقُولُ	yaqûlu

## 4. Diftong

أَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

## 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmân

الْعَالَمِينَ = al-‘Âlamîn

## ABSTRAK

Pada tanggal 27 Agustus 2018, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengesahkan suatu peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah. Salah Satu bentuk perubahannya terletak pada persyaratan calon wali nasab. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 2 memberi persyaratan wali nasab yaitu: (1) Laki-laki, (2) Beragama Islam, (3) *Bâligh* berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, (4) Berakal, (5) Merdeka, dan (5) Dapat berlaku adil. Selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: (1) Laki-laki, (2) Beragama Islam, (3) *Bâligh*. (4) Berakal, (5) Merdeka, dan (5) Dapat berlaku adil. Dalam peraturan tersebut terjadi pergeseran hukum yaitu pada poin ketiga pada kata *bâligh* yang awalnya ada ketentuan batas umur, untuk yang sekarang tidak ada batasan umur.

Berdasarkan latar belakang diatas, Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap ketentuan peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 pasal 11 tentang penghapusan batas usia *bâligh* sebagai syarat wali dalam pernikahan ? (2) Bagaimana dampak dari ketentuan peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 pasal 11 tentang penghapusan batas usia *bâligh* sebagai syarat wali bagi KUA dalam menentukan wali nasab ?

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan datanya menggunakan study dokumen dan wawancara. Untuk analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 jika dikaitkan dengan ketentuan *bâligh* atau dewasa pada hukum positif di indonesia seperti Undang-undang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam akan nampak berbeda bahkan tidak ada sinkronisasi peraturan umur antara satu dengan yang lain. Namun jika ditinjau sebagai pedoman pencatatan perkawinan, Peraturan Menteri

Agama Nomor 19 Tahun 2018 dapat menerapkan *asas lex specialis derogat legi generalis* terhadap peraturan hukum positif yang lain sehingga mempunyai daya laku sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. (2) Dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang syarat wali nasab yang hanya tercantum *bâligh* adalah sebagai berikut: Dampak positif yaitu, penentuan wali bersifat fleksibel atau tidak kaku. Dampak negatifnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, akan menimbulkan multi tafsir. *Kedua*, peraturan menjadi kabur atau bias. *Ketiga*, timbul keraguan dalam menentukan wali nikah tersebut. *Keempat*, menimbulkan pandangan yang berbeda antara penghulu.

**Keyword ; Peraturan Menteri Agama, *Bâligh*, wali nikah**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Studi Analisis Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan**

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Arja' Imroni M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. Bapak H. Tolkah M.A., dan Bapak Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Styani, SH., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku

Wakil Kepala Jurusan Hukum Keluarga.

4. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah S.HI. M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah bersabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku Wali Dosen Penulis yang selalu memberikan pembelajaran dan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Segenap keluarga besar Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an yang selalu member nasehat-nasehat yang baik dan selalu memberikan mensupport positif
8. Untuk Evi Isfahani yang selalu memberi semangat dan doa guna kelancaran skripsi penulis
9. Bapak Choirul Anwar selaku Penghulu KUA Kecamatan Sumowono yang senantiasa memberi arahan dan data guna menyelesaikan skripsi ini.
10. Rona, Akbar, Asyfihan Makin, Samsul, Habib, Rozi, Miftah, Alkurni, Iana, Dian Wahyuningasih dan Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Aamiin. Penulis menyadari bahwa dalam



penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 9 Oktober 2019

**Ahmad Nafii Ihsan**  
**NIM.1502016086**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN</b>	
<b><i>BÂLIGH</i></b>	
A. Wali.....	24
1. Pengertian Wali.....	24
2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	26
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	33

4. Syarat-Syarat Wali.....	37
B. Baligh .....	41
1. Pengertian <i>Bâligh</i> .....	41
2. Ketentuan <i>Bâligh</i> menurut Hukum Islam .....	41
3. Ketentuan <i>Bâligh</i> menurut Hukum Positif.....	46
C. Perubahan Hukum .....	47

### **BAB III KETENTUAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 PASAL 11 TENTANG PENGHAPUSAN BATAS USIA *BÂLIGH* SEBAGAI SYARAT WALI DALAM PERNIKAHAN DAN DAMPAKNYA**

A. Sekilas tentang Peraturan Menteri Agama	
Nomor 19 Tahun 2018.....	50
1. Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.....	50
2. Kedudukan PMA 19/2018 dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ...	51
3. Ketentuan Baligh Sebagai Syarat Wali Nikah dalam Pernikahan Menurut PMA Nomer 11 Tahun 2007 dan PMA Nomor 19 Nomer 2018..	57
B. Dampak dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama	
Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 tentang Penghapusan Batas Usia <i>Bâligh</i> Sebagai Syarat Wali Bagi KUA dalam Menentukan Wali Nasab dalam Pernikahan.....	60

1. Tanggapan Para Penghulu Terhadap  
Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor  
19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan  
Batas Usia Baligh Sebagai Syarat Wali ..... 60
2. Dampak Dari Ketentuan Peraturan Menteri  
Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11  
Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh*  
Sebagai Syarat Wali Menurut Para Penghulu ... 65

#### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PASAL 11 PERATURAN MENTERI AGAMA NO 19 TAHUN 2018 TENTANG PENGHAPUSAN BATAS USIA BALIGH SEBAGAI SYARAT WALI DALAM PERNIKAHAN**

- A. Analisis Hukum Positif terhadap Pasal 11  
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018  
tentang Syarat Wali dalam Pernikahan ..... 69
- B. Analisis Dampak dari Ketentuan Pasal 11  
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018  
Tentang Penghapusan Batas Usia Baligh Syarat  
Wali dalam Pernikahan Bagi KUA dalam  
Menentukan Wali Nasab dalam Pernikahan ..... 75

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 81
- B. Saran ..... 82
- C. Penutup ..... 82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar belakang**

Perkawinan adalah sebuah peristiwa penting dalam hidup dua anak manusia yang berlainan jenis untuk mengikatkan diri dalam suatu akad dan janji demi mengarungi suka duka hidup di dunia bersama-sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sahny suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada Pasal2 Undang-Undang ini.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah. Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pada Pasal 3 kompilasi hukum Islam dijelaskan

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>2</sup>

Pada tanggal 27 Agustus 2018, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengesahkan suatu peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153 oleh Widodo Ekatjahjana. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan ini penting bagi yang akan menikah atau membutuhkan informasi tentang perkawinan tentunya.<sup>3</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Terdapat perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama sebelumnya tentang Pencatatan Nikah, menjadi Pencatatan Perkawinan, hal ini disesuaikan dengan istilah yang ada pada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk perubahan lainnya yang terdapat dari Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan wali. Apabila

---

<sup>2</sup>Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal.<sup>4</sup>

Menurut bahasa wali merupakan bentuk dari *isim fail* yang berasal dari *fi'il madzi* ( ولى ) yang semakna dengan ( ولاة : ناصره ) yang berarti menolong dan ( الولي:الحليف ) yang berarti bersekutu, seperti kalimat ( من ولي امر احد ) yang berarti orang yang mengurus / menolong perkara seseorang.<sup>5</sup>

Menurut istilah wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.<sup>6</sup>

Menurut Sayyid Sabiq perwalian merupakan ketentuan syari'at yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun secara khusus, perwalian jiwa dan perwalian harta. Namun dalam pembahasan ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 94.

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, cet. 25, 2002), 1582-1583.

<sup>6</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Fiqh, tt). 691.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 368.



الولي فى النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الاب اووصية والقريب العاصب المعتق والسلطان والمالك

Artinya: “Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, mutiq (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.”<sup>8</sup>

Menurut Imam Syafi’i wali merupakan penentu sah dan tidaknya perkawinan. Prosesi akad nikah tidak sah tanpa adanya wali. Karena menurut beliau tidak ada pernikahan tanpa adanya seorang wali. Dasar yang beliau gunakan adalah:<sup>9</sup>

a. Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhala MadzahibilArba'ah*, Juz IV, (Beirut: Darl Al-Kutb al-Ilmiyah, t.t), 29.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

*dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah:232).*<sup>10</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perempuan yang dapat menikah dengan tanpa wali. Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Ma'qal bin Yasar mengawinkan seorang saudara perempuannya dengan seorang laki-laki, kemudian suaminya menceraikannya. Ketika telah habis masa iddahnyanya, laki-laki tersebut kembali datang untuk meminangnya. Kemudian Yasar berkata: “aku telah mengawinkanmu, mempersiapkan peralatan rumah tangga untukmu dan memuliakanmu, lantas kau menceraikannya. Setelah itu kau datang lagi untuk meminangnya. Tidak! Demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu selamanya.”Padahal saat itu saudara perempuannya ingin kembali dengan suaminya. Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan ayat tersebut.

b. Hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَهِيَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "

Artinya : “Dari Aisyah bahwasannya Nabi telah bersabda:Perempuan yang mana saja menikah tanpa izin walinya,maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli,maka dia berhak mendapatkan mahar

---

<sup>10</sup>DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 37.

*akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. (HR. Ahmad Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)”.<sup>11</sup>*

Dalil tersebut memberikan implikasi bahwa perempuan yang hendak menikah harus dengan persetujuan dan pendampingan dari wali (orang-orang yang ditetapkan syara' sebagai seseorang yang memiliki wewenang atas orang lain).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.<sup>12</sup>

Dikarenakan keberadaan wali nikah sangatlah penting dan menurut jumhur ulama termasuk dalam rukun pernikahan, maka dari itu wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (peraturan sebelumnya), syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut: Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;

---

<sup>11</sup> As-syafii, *Al-Umm*, (Beirut ; Dar al Kutub almiyah, Juz 5, t.th), 24.

<sup>12</sup> Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Fiqh, tth). 694.

2. Beragama Islam;
3. *Bâligh* , berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.<sup>13</sup>

Selanjutnya diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan , dalam pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. *Bâligh*
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.<sup>14</sup>

Sebenarnya dalam kedua peraturan tersebut tidak terlalu ada perubahan yang signifikan, perubahan tersebut hanya terletak pada poin ketiga tentang kata Baligh yang awalnya ada tambahan umur sekurang-kurangnya 19 tahun, sekarang menjadi hanya tercantum baligh tanpa ada lagi batasan umur.

Jika dilihat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (peraturan yang lama), Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa atau sejalan dengan keyakinan hukum yang

---

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Agama Nomer 11 Tahun 2007

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda dan terlihat kontroversi adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, yakni, kata "berumur sekurang-kurangnya 19 tahun". Jadi usia baligh menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut banyak diperdebatkan karena dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun disisi lain justru ketentuan dalam peraturan tersebut memiliki ketegasan dan kepastian hukum yang sudah paten.

Dalam peraturan yang baru Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, mengenai ketentuan syarat wali nasab tersebut hanya tercantum kata *bâligh* dan tidak lagi ada kata-kata sekurang-kurangnya 19 tahun, hal tersebut bisa jadi salah satu bentuk tindak lanjut dari perdebatan pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya agar disesuaikan dengan hukum Islam yang hanya memberi ketentuan *bâligh* sebagai syarat wali nasab.

Menurut bahasa *bâligh* biasa diartikan dengan yang matang, yang akil baligh, dewasa.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah kata baligh mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, cet. 25, 2002), 107.

<sup>16</sup> Sulaiman *Rasjid, Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 46, 2010), 83.

Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة وعلى ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري, أبو داود, الترمذي, ابن ماجه, والد رقطني)

Artinya: “Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (*ihtilam*)”. (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).<sup>17</sup>

Menurut hadis tersebut, anak-anak yang sudah bermimpi dan mengeluarkan mani (*ihtilam*) sudah dapat dikatakan *bâligh* atau dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pada dasarnya jika perwalian calon mempelai perempuan dilakukan oleh ayahnya kandung sendiri tidak akan timbul permasalahan dikarenakan ayah kandung dari calon mempelai perempuan sudah pasti termasuk katagori baligh. namun jika ayah kandung dari calon perempuan sudah tidak ada otomatis akan pindah hak perwaliannya ke wali *Ab'ad*. Bisa jadi hak perwalian jatuh ke saudara laki-laki kandung, dalam hal ini adek laki-laki , atau bahkan

---

<sup>17</sup>Al-San'any, *Subul-Salam*, juz 3, (Kairo : Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M), 179.

dapat beralih ke anak laki-laki kandung jika calon perempuan tersebut janda yang mempunyai anak laki-laki. Jika ini terjadi otomatis dalam menentukan baligh akan lebih susah dan tidak dapat dipastikan secara langsung.

Untuk menentukan usia *bâligh* para Ulama Mazhab berbeda-beda pendapat. Syafii dan Hambali menyatakan : Usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan. tujuh belas tahun. Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.<sup>18</sup>

Dalam regulasi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ketika menentukan batas umur *bâligh* atau dewasa juga terjadi banyak perbedaan. Dalam Pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya<sup>19</sup>. Kemudian Pasal 1330 KUHPer berbunyi tidak cakap

---

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh a'la al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut : Dar alJawad, tth), 89.

<sup>19</sup> Pasal 330 KUHPerdata.

adalah belum dewasa bagi mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.<sup>20</sup> Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya.<sup>21</sup> Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.<sup>22</sup>

Pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Agama yang sebelumnya dalam menentukan usia *bâligh* sebagai syarat wali nasab relatif lebih mudah dikarenakan adanya batas umur yang sudah konkrit yaitu minimal 19 tahun namun dengan adanya Peraturan Menteri Agama yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomer 19 tahun 2018 mengakibatkan peraturan syarat wali tersebut menjadi kabur dikarenakan hilangnya patokan umur tersebut ditambah lagi dalam menentukan *Bâligh* atau dewasa banyak terjadi perbedaan baik hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak kepada lembaga pelaksana peraturan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal menentukan wali nasab yang sah. Selain itu

---

<sup>20</sup> Pasal 1330 KUHP data

<sup>21</sup> Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



penghapusan batas umur tersebut memungkinkan wali nikah dapat dilakukan oleh anak-anak, yang menurut perundang-undangan yang berlaku dianggap tidak sah dalam melakukan tindakan hukum.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 PASAL 11 TENTANG PENGHAPUSAN BATAS USIA *BÂLIGH* SEBAGAI SYARAT WALI DALAM PERNIKAHAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* Sebagai Syarat Wali dalam Pernikahan?
2. Bagaimana Dampak dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* sebagai Syarat Wali bagi KUA dalam Menentukan Wali Nasab ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuatu yang akan dilakukan dalam penelitian pasti mempunyai maksud dan tujuan yang hendak dicapai, tidak terkecuali dengan penulisan skripsi ini. Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Positif terhadap Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* Sebagai Syarat Wali dalam Pernikahan.
2. Untuk mengetahui Dampak dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* sebagai Syarat Wali bagi KUA dalam Menentukan Wali Nasab.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan dan skripsi ini pernah dikaji sebelumnya atau tidak. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan :

1. Skripsi karya Agus Muslih (2011) yang berjudul “*Studi Analisis terhadap Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan*”.<sup>23</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa peraturan persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena

---

<sup>23</sup>Agus Muslih, “*Studi Analisis terhadap Pasal 18 PERATURAN MENTERI AGAMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan*”. Skripsi, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2011, 70, td.

dengan demikian wali nikah yang sudah matang akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dan yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah adalah adanya pasal yang mengatur tentang dispensasi bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun dalam keadaan tertentu mereka tetap boleh menjadi wali nikah. Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan wali, dan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada pembatasan usia wali nasab pada Peraturan Menteri Agama yang lama, sedangkan penulis akan berfokus pada penghapusan batas usia wali nasab pada Peraturan Menteri Agama yang baru.

2. Skripsi karya Abdul Latif (2013) yang berjudul *“Batas Usia Bâligh Syarat Saksi Nikah (Analisi Hukum Islam terhadap Batas Bâligh Syarat Saksi Nikah dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)”*.<sup>24</sup> Dalam skripsi tersebut lebih cenderung membahas batas umur saksi dan penulis menyimpulkan Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu penulis berpendapat Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Junto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 47 ayat 1 dan 2 dan Kompilasi Hukum

---

<sup>24</sup> Abdul Latif, *“Batas Usia Bâligh Syarat Saksi Nikah (Analisi Hukum Islam terhadap Batas Bâligh Syarat Saksi Nikah dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)”* Skripsi, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2013, 60, td.

Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 karena menganut *asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 harus berlandaskan dan bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai *lex generalis*-nya. Namun jika ditelaah dari hukum Islam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 merupakan perkembangan progressif dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia. Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan *Bâligh* , dan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada batas usia saksi dalam pernikahan, sedangkan penulis akan berfokus pada penghapusan batas usia wali dalam pernikahan.

3. Skripsi karya Nailur Rohmah (2011) yang berjudul *“Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya”*.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini lebih cenderung membahas realita yang ada di KUA Tambaksari yaitu pemikahan yang dilakukan oleh Temma Nifianto, S.sos dengan Anita Ayu Luhhantari dengan wali nasab saudara kandung yang berusia 18 tahun, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2)

---

<sup>25</sup> Nailur Rohmah, *“Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya”*Skripsi, Surabaya, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2011, 85, td

yang menyebutkan syarat wali nasab dengan baligh, berusia sekurang- kurangnya 19 tahun, namun pernikahan ini dapat terlaksana dengan kebijakan dari KUA Kee. Tambaksari dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang matang setelah melihat faktor-faktor pendukung sehingga diizinkan pemikahan tersebut berlangsung. Pemikahan ini telah memenuhi rukun dan syarat pemikahan menurut Hukum Islam juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 2 (1) dan KHI Pasal 4, serta wali tersebut telah memenuhi syarat menjadi wali dalam Hukum Islam maupun KHI Pasal 21 yang juga menjadi salah satu pertimbangan terlaksananya pernikahan tersebut. Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan Dampak Peraturan Menteri agama yang baru dan lama , dan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada kasus pembolehan usia dibawah 19 tahun yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama yang lama, sedangkan penulis akan berfokus pada dampak dari Peraturan Menteri Agama yang baru.

4. Skripsi karya Fitriyatul Mutmainah (2014) yang berjudul "*Pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur (studi kasus di kecamatan Plantungan kabupaten Kendal)*".<sup>26</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti menerangkan bahwa terjadi pengulangan akad nikah di Desa Bendosari Kecamatan

---

<sup>26</sup> Fitriyatul Mutmainah, "*Pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur (studi kasus di kecamatan Plantungan kabupaten Kendal)*". Skripsi, Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2014, 92 , td.

Plantungan Kabupaten Kendal terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam menentukan usia wali nasab antara Pegawai Pencatat Nikah dengan Kyai setempat. Menurut sebagian Kyai di Kecamatan Plantungan bahwa batasan usia wali nikah mengacu kepada kitab-kitab empat (4) madzhab fiqh klasik yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa wali nikah dianggap baligh dengan usia kebalighan seseorang yakni ihtilam, Syafi'i dan Hambali menyatakan 15 tahun, Maliki 17 tahun, dan Hanafi maksimal 18 tahun minimal 12 tahun. Sedangkan baligh dalam penafsiran Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat (2) C adalah sekurang-kurangnya berumur 19 Tahun. Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan dampak dari Peraturan Menteri agama yang lama dan yang baru, dan perbedaannya adalah Skripsi ini berfokus pada kasus pengulangan nikah dikarenakan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, sedangkan penulis akan berfokus pada dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019.

5. Skripsi karya Ahmad Adib dengan judul *“Study Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Anak menjadi Wali Nikah*

*Ibunya*”<sup>27</sup> Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa sebagaimana telah diketahui dalam masalah perwalian masih terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam pernikahan, apakah wali menjadi rukun nikah atau tidak?. Terlebih lagi tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Pendapat Imam Syafi’i dalam masalah ini tidak sama dengan imam yang lain. Hal ini sebenarnya biasa sebab pemahaman para ulama’ dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan lingkungan masyarakat serta situasi tempat para ulama’ itu berada. Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pembahasan Wali, dan perbedaannya adalah Skripsi ini berfokus pada pendapat Imam Syafi’i tentang wali nikah yang dilakukan oleh anak-anak, sedangkan penulis akan berfokus pada penerapan Peraturan Menteri agama Nomor 19 Tahun 2018 jika wali dilakukan oleh anak-anak.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mempunyai persamaan yaitu membahas tentang ketentuan wali nasab dalam pernikahan. Namun yang menjadi titik beda dalam penelitian yaitu penulis berfokus kepada dampak dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 (peraturan baru) bagi KUA dalam menentukan kriteria baligh wali nasab dalam pernikahan. Sedangkan skripsi sebelumnya

---

<sup>27</sup> Ahmad Adib, “*Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Anak menjadi Wali Nikah Ibunya*”, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008, 14.

lebih cenderung kepada peraturan yang lama dan fokus ke masalah wali nasab maka tidak memungkinkan untuk ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

## **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>28</sup> Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan doktrinal yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan.<sup>29</sup> Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian kepustakaan terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

### **2. Sumber data**

#### **a. Data primer**

---

<sup>28</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), 82.

<sup>29</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 118.



Data primer yaitu sumber data utama yang menjadi dasar penelitian yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatat perkawinan

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data sekunder ini diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>30</sup> Data sekunder antara lain: buku, jurnal, ensiklopedia, dan wawancara. Bahan kepustakaan tidak hanya berupa teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai, tetapi dapat pula berupa hasil- hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya, yang memiliki keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini peneliti menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian di lakukan dengan meneliti sumber-sumber data tertulis yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007,

---

<sup>30</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 88.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, UU Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdata, KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan literatur lain yang relevan serta mendukung obyek kajian, selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan sehingga dapat memperoleh data yang faktual dan valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan guna menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Subyek wawancara dalam hal ini adalah Para Penghulu yang diambil secara acak di lima kecamatan di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang.

#### 4. Metode analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>31</sup> Untuk analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mencoba melakukan penyelidikan dengan menampilkan data dan menganalisisnya untuk kemudian di ambil sebuah kesimpulan.<sup>32</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima (5) Bab yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Prof. Dr Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 335.

<sup>32</sup>Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah: Dasar, Metode, Tekhnik*, (Bandung: Tarsito, 1998), 139.

**Bab pertama.** Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab kedua** berisi tinjauan umum tentang wali nikah, *Bâligh* dan perubahan hukum yang meliputi (pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali nikah, syarat-syarat wali, pengertian *Bâligh*, ketentuan *Bâligh* menurut Islam dan hukum positif dan perubahan hukum).

**Bab ketiga** berisi Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 tentang penghapusan batas usia *bâligh* sebagai syarat wali dalam pernikahan dan dampaknya meliputi (sekilas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, Ketentuan *bâligh* Sebagai syarat wali nasab dalam pernikahan Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dan dampak dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 tentang penghapusan batas usia *bâligh* sebagai syarat wali dalam pernikahan bagi KUA)

**Bab keempat** berisi analisis Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 tentang penghapusan batas usia *bâligh* sebagai syarat wali dalam pernikahan dan dampak bagi KUA yang meliputi (analisis terhadap Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 tentang penghapusan batas usia *bâligh* sebagai syarat wali dalam pernikahan, analisis dampak dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

Pasal 11 tentang penghapusan batas usia *bâligh* sebagai syarat wali dalam pernikahan bagi KUA).

**Bab kelima** merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH DAN *BÂLIGH*

#### A. Wali

##### 1. Pengertian Wali

Secara etimologi bahwa wali merupakan bentuk dari *isim fail* yang berasal dari *fi'il madzi* ( ولى ) yang semakna dengan ( والا :نا صره ) yang berarti menolong dan ( الولي:الحليف ) yang berarti bersekutu, seperti kalimat ( من ولي امر احد ) yang berarti orang yang mengurus / menolong perkara seseorang.<sup>33</sup>

Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu.<sup>34</sup>

Kata wali dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.<sup>35</sup>

Perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas

---

<sup>33</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, cet. 25, 2002), 1582-1583.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Fiqh, tt.), 691.

<sup>35</sup> Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.

nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan pernuatan hukum.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Sabiq perwalian merupakan ketentuan syari‘at yang diberlakukan untuk orang lain, baik secara umum maupun secara khusus, perwalian jiwa dan perwalian harta. Namun dalam pembahasan ini perwalian yang dimaksud adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.<sup>37</sup>

Abdurrahman al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai berikut:

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه وهو الاب اووصية والقريب العاصب المعتق والسلطان والمالك

Artinya: “Wali didalam nikah adalah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau orang yang diberi wasiat, kerabat dari pihak ayah, mu’tiq (orang yang memerdekakan budak), sulthan dan penguasa yang berwenang.”<sup>38</sup>

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama

---

<sup>36</sup> Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Prenadia Group, 2016),15.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 368.

<sup>38</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh „ala Madzahibil „Arba’ah*, Juz IV, (Beirut: Darl Al-Kutb al-Ilmiyah, t.th), 29.

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>39</sup>

Dari uraian diatas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan wali nikah adalah orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

## **2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan**

Terdapat perbedaan pandangan antara pengertian perwakilan nikah menurut hukum (*legal representative*) dan perwalian versi Fiqh. Perwakilan menurut hukum adalah seseorang yang setuju mewakili seseorang melalui perundingan antara kedua pihak dan mewakili pihak lain. Wakil dalam pengertian ini mempunyai otoritas atau kewenangan yang amat terbatas. Juga peranan perwakilannya hanya ditujukan untuk suatu kepentingan tertentu. Dalam pernikahan, perwakilan ini memang mungkin ada, tetapi bentuknya sangat terbatas. Wakil di sini lebih banyak berfungsi. menyiapkan penyelenggaraan

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003),

pernikahan, bukan sebagai wali. Adapun perwakilan menurut Fiqh adalah menjadikan orang lain sebagai wakil untuk melaksanakan akad nikah. Jadi, wakil di sini bertindak sebagai wali nikah. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa setiap orang yang memiliki *haqq al-tasarruf* (melakukan perbuatan hukum) yang dapat digantikan orang lain, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain.<sup>40</sup>

Keberadaan seseorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang dimintai persetujuannya untuk melangsungkan perkawinannya tersebut.<sup>41</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sebab disyariatkannya wali bagi pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya.

---

<sup>40</sup>La Ode Ismail Ahmad, *Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhaddidan Kontemporer*, Jurnal al Mayyiah, Vol 8 No. 1 januari-juni 2015, 47

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007). 69.



Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan untuk kepentingan pribadi wali.<sup>42</sup>

Mengenai wali yang melaksanakan akad nikah, masih terdapat banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat untuk mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya adalah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang sudah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat tersebut disebabkan oleh tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.<sup>43</sup>

Diantara ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan wali adalah sebagai berikut:

1) Q.S. an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang

---

<sup>42</sup>Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu*, Juz IV, (Bairut: Dar Fiqh, tt.), 694.

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 69.

*layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”(an-Nur: 32)<sup>44</sup>*

Ayat tersebut mengisyaratkan agar mengawinkan orang-orang yang masih sendiri dan Allah akan memberikan karunia kepada mereka

2) Q.S. al-Baqarah:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah:232)<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 327.

<sup>45</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 37.

Ayat diatas melarang wali untuk mencegah perkawinan anak perempuannya dengan bekas suaminya.

3) Q.S. an-Nisa: 25

فَأَنكِحُواهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka*”. (an-Nisa: 25)<sup>46</sup>

Ayat-ayat diatas menunjukan tentang orang yang hendak menikah agar meminta izin kepada walinya, dikarenakan wali yang akan bertanggung jawab penuh atas seseorang dalam ampuannya.

Sedangkan hadits yang menerangkan adanya wali dalam pernikahan adalah

حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن الشوارب حدثنا ابو عوانة حدثنا ابو اسحاق الهمداني عن بردة عن ابي بردة عن ابي موسى قال : قال رسول الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Telah berceritakan pada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Asy Syuwarib Berceritakan pada kami Abi ‘Awanah. Berceritakan pada kami Abu Ishak Al-Hamdaniyyi dari Abi Burdah dari Abu Musa r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “tidak sah nikah kecuali ada wali”* (HR Ibn Majah).”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), 82.

<sup>47</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnan Ibn Majah*, Juz. I, (Beirut: Dal al Fikr, tt.), 31.

Hadist diatas sangatlah jelas bahwa wali harus ada dalam suatu pernikahan, dikarenakan akan mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له". أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عونة وابن حبان والحاكم.

Artinya: "Dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: Perempuan mana saja jika menikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan jika (laki-laki yang menikahnya) mencampurinya, maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang telah ia peroleh dari kemaluannya. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." dikeluarkan oleh Imam yang empat kecuali an-Nas'i, dishohihkan oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban dan al-Hakim.<sup>48</sup>

Artinya harus ada wali dalam pelaksanaan akad nikah atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Dan ketika laki-laki yang menikahnya tersebut telah mencampurinya maka wajib bagi laki-laki tersebut untuk membayar mahar. Selain itu hadist tersebut

---

<sup>48</sup> Ibnu Hajar al -Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 204.

menjelaskan bahwa wali yang terdekat enggan untuk menikahkan mempelai tersebut maka hakim lah yang akan bertugas menggantikan wali dalam pernikahan.

عن ابن عباس، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: {  
الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها}  
رواه مسلم. وفي لفظ: {ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة  
تستأمر}. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas R.A, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis hendaklah dimintai persetujuannya, sedangkan ijinnya adalah diamnya dia .*” {HR. Muslim}. Dalam sebuah lafadz disebutkan, “*seorang wali tidak memiliki kekuasaan terhadap seorang janda, sedangkan seorang gadis dimintai persetujuannya.*” {HR. Abu Dawud dan an-Nasa-i, dishohihkan oleh Ibnu Hibban}.<sup>49</sup>

Maksud hadist tersebut adalah bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya dalam menentukan orang yang dikehendaki. Sedangkan seorang gadis akan merasa malu untuk menentukan orang yang dikehendakinya, sehingga diharuskan meminta izin darinya. Dan hadits itu tidak berarti bahwa seorang janda dan gadis boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan orang lain yang mau menikahkannya, padahal walinya masih ada.

---

<sup>49</sup> Ibnu Hajar al -Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Nurul Huda, tt.), 205.

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas dapat kita simpulkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan. Dan jika wali pengampu yang paling dekat tidak berkenan atau tidak mampu untuk menikahkan maka perwalian tersebut dapat digantikan oleh hakim.

### 3. Macam-Macam Wali Nikah

Banyak jenis wali yang dimunculkan para ulama, baik yang berhubungan dengan keturunan/nasab ataupun dengan sebab lainnya, antara lain: wali nasab, wali karena membeli hamba sahaya (wali *milk*), wali karena memerdekakan hamba sahaya (wali *mu'tiq*), wali karena wasiat (wali *wusha*), wali karena perjanjian tertentu (wali *walayah*), dan wali hakim. Namun yang disinggung dalam pernikahan di Indonesia hanya dua: (1) wali nasab, (2) wali hakim.<sup>50</sup>

Wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, bukan dari garis keturunan (rahim) ibu.<sup>51</sup>

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 75.

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 75

sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Definisi tersebut perlu dikritisi, terutama ungkapan "bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali". Lebih tepat kiranya jika ungkapan tersebut diubah menjadi "bagi calon mempelai wanita yang karena hal-hal tertentu yang menurut peraturan mengharuskan menikah menggunakan wali hakim".<sup>52</sup>

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

*Pertama:* wali dekat atau *wali qarib*; yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anak yang masih muda tanpa meminta persetujuan dari anak tersebut.<sup>53</sup>

*Kedua:* wali jauh atau *wali ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 75

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 76

- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak laki-laki paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada Anak laki-laki paman seayah.<sup>54</sup>

Wali Hakim telah disebutkan, bahwa wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang telah dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberi kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 76.



*adhol* (enggan). Dalam hal wali *adhol*, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:

- 1) Wali nasab memang tidak ada
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang berihram haji atau umroh
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perkawinannya.<sup>55</sup>

Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya kandung atau seayah. Adapun ketentuan tentang wali hakim, bahwa hakim berhak untuk menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حدثنا ابو كوريب حدثنا عبد الله ابن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ص. م . قال ولي ا لسلطان ولي من لا ولي له(رواه ابن ماجه)

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 76

Artinya: “Telah diceritakan pada kami Abu Kuraib. Diceritakan pada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Hujjaq dari Az Zuhriyyi dari ‘Urwah dari ‘Aisyah dari Nabi SAW Bersabda: Pemerintah (hakim) menjadi wali pada orang yang tidak mempunyai wali (HR Ibnu Majah)”.<sup>56</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Wali

Wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan sehingga keberadaanya sangat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut. Jadi tidak sembarangan orang untuk bisa menjadi wali nikah, maka dari itu wali nikah mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam buku Prof Amir Syarifudin menyatakan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali adalah sebagai berikut.<sup>57</sup>

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi Wali. Ini merupakan syarat umum bagi seorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dan hadis Nabi yang bunyinya

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق

Artinya: “Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai Q'a dewasa, dan orang gila sampai ia sehat”.

---

<sup>56</sup> Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunnan Ibn Majah*, Juz. I, (Beirut: Dal al Fikr, tt.), . 31.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), 76-78.

- b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas. ( Ibnu al-Hummam, 256; al-Thusiy, 163)
- c) Muslim; tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28:

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء

Artinya: “janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia (dari pertolongan Allah)”.

- d) Orang merdeka; Menurut pendapat sekelompok ulama, seorang budak laki-laki tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri ataupun orang lain.
- e) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.

Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

- f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun. Ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya Wali dalam perkawinan. (al-Thusiy, 163) Keharusan wali itu adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadis dari Aisyah menurut riwayat al-Quthniy:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *“Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil”*.

- h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari 'Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan: 623 )

لا ينكح المحرم ولا ينكح

Artinya: *“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”*.

Dalam hal persyaratan ini ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram. (Ibnu al-Humam; 232)

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (peraturan sebelumnya) , syarat bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. *Bâligh* , berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.<sup>58</sup>

Kemudian diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. *Bâligh* ;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pada poin ketiga merupakan hal paling utama yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini.

## **B. Baligh**

### **1. Pengertian *Bâligh***

Menurut bahasa *bâligh* biasa diartikan dengan yang matang, yang akil *bâligh*, dewasa,<sup>60</sup> sedangkan menurut istilah kata *bâligh* mengandung pengertian seseorang yang telah mencapai usia tertentu dan dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.<sup>61</sup>

### **2. Ketentuan *Bâligh* menurut Islam**

Dalam khazanah ilmu fiqh, penentuan baligh didasarkan kepada kejadian *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة وعلى ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري، أبوداود، الترمذي، ابن ماجه، والدرقطني)

Artinya: “Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban

<sup>59</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>60</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, cet. 25, 2002), 107.

<sup>61</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 46, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, , 2010), 83.

*seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ihtilam)*” (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).<sup>62</sup>

Menurut hadis tersebut, anak-anak yang sudah bermimpi dan mengeluarkan mani (*ihtilam*) sudah dapat dikatakan *bâligh* atau dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam alqur'an juga terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang tema yang sama (yaitu soal *bâligh*), tetapi dalam konteks yang berbeda. Dengan konteks yang berbeda-beda itu, tema tersebut dapat didudukkan pada perbincangan yang lebih luas sebagai upaya menghindari reduksi.<sup>63</sup>

*Pertama, bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balagha al-hulum*” [QS. al-Nur: 59]. Kalimat ini mengandung kedewasaan seseorang dalam konteks kedewasaan fisik yang ditandai dengan ‘mimpi basah’.

*Kedua, bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balaghû al-nikâh*” [QS. al-Nisa`: 6], yang berarti sudah cukup umur untuk menikah, yang ditandai dengan *al-rusyd* (cakap dan pandai). Kata *bâligh* di sini memberi pengertian tentang kedewasaan seseorang dalam konteks tanggungjawab, khususnya tanggungjawab dan kecakapan dalam mengelola harta.

---

<sup>62</sup> Al-San'any, *Subul-Salam*, juz 3, (Kairo : Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M), 179.

<sup>63</sup> Mukti Ali, “*Kedewasaan Menurut Al-qur'an*”. Rumah Kitab, Juni 2016

Tanggungjawab terkait erat dengan mental, pikiran dan psikologis seseorang.

*Ketiga, bâligh* yang disebutkan dalam kalimat “*balagha asyuddah*” [QS. al-Ahqaf: 15, dan QS. al-Qashash: 14], yakni telah sempurna kekuatannya, akalanya, dan pandangannya. *Bâligh* dalam ayat ini berbicara dalam konteks kematangan seseorang. Dalam hal ini *bâligh* bisa diibaratkan seperti buah yang secara alamiyah telah matang di pohonnya sehingga siap untuk dipetik atau dipanen. Jika buah yang belum matang dipetik lalu dimakan, kadang dapat membuat perut sakit atau seringkali tidak ada manfaatnya.

Ketiga pengertian *bâligh* tersebut jika didekati dengan pendekatan *tafsîr al-âyat bi al-âyat*, maka bisa saling melengkapi dalam memberikan gambaran komprehensif tentang kedewasaan. Selama ini pengertian dewasa yang dikenal adalah dewasa secara fisik saja, dan itu merupakan reduksi terhadap makna kedewasaan menurut al-Qur`an: menggunakan satu ayat dan mengabaikan ayat-ayat yang lain. Jika selama ini, misalnya, seorang anak berusia 15 tahun sudah dianggap dewasa karena telah mengalami mimpi basah, sejatinya pengertian tersebut telah mereduksi ayat-ayat lainnya yang menegaskan tentang aspek kedewasaan yang lebih substansial dan esensial yaitu *al-rusyd* (kecakapan dan kepandaian) dan *asyuddah* (telah sempurna kekuatannya, akalanya, dan pandangannya).



Bila ketiga pengertian tersebut dipadukan, maka dewasa menurut al-Qur`an adalah dewasa secara fisik, pikiran, mental, psikologis, sudah memiliki tanggung jawab, dan sudah matang seperti buah yang matang di pohonnya dan siap untuk dipetik dan dimakan.

Para Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria indikasi luar untuk mengetahui baligh. Perbedaan fatwa di antara para Ulama Madzhab tentang kriteria baligh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.<sup>64</sup>

No	Madzhab Hukum	Kriteria baligh
1	Madzhab Syafi'i (fiqh syafi'iyah)	<b>Laki-laki dan Perempuan:</b> 1. Usia anak genap 15 tahun Qomariyah, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun) 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan <b>Perempuan:</b> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <b>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</b>

---

<sup>64</sup> Ali Imron HS, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang; CV.Karya Abadi Jaya, 2015), 126-127.

2	<p>Madzhab Maliki (fiqh malikiyyah)</p>	<p><b>Laki-Laki dan Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga</li> <li>2. Tumbuhnya rambut kasar disekitar kemaluan</li> <li>3. Tumbuhnya rambut di ketiak</li> <li>4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan</li> <li>5. Perubahan pita suara</li> <li>6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun</li> </ol> <p><b>Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haid, dan atau</li> <li>2. Hamil.</li> </ol> <p>Usia Rata-rata Laki-laki dan Perempuan 18 tahun</p>
3	<p>Madzhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)</p>	<p><b>Laki-laki:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berumur minimal 12 tahun, Dan atau</li> <li>2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau</li> <li>3. Menghamili wanita.</li> </ol> <p><b>Perempuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haid, dan atau</li> <li>2. Hamil</li> <li>3. Berumur minimal 9 tahun</li> </ol> <p>Imam Abu Hanifah memberikan usia rata-rata:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laki-laki 18 tahun,</li> <li>2. Perempuan 17 tahun</li> </ol>

4	MadzhabHambali (fiqh hanabillah)	Sama dengan Syafi'iyah
---	-------------------------------------	------------------------

Wahbah al Zuhayli menyimpulkan bahwa berdasarkan berbagai pendapat para ulama, maka terdapat 5 kriteria baligh yaitu 3 untuk laki-laki dan perempuan sedangkan yang 2 khusus untuk perempuan. Yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yaitu (1) keluarnya air mani, (2) tumbuhnya rambut kemaluan, dan (3) batasan usia tertentu. Sedangkan yang khusus perempuan yaitu (1) haid, dan (2) hamil.<sup>65</sup>

### 3. Ketentuan *Bâligh* menurut Hukum Positif

Dalam menentukan batas umur *bâligh* atau dewasa, beberapa peraturan di Indonesia mengalami perbedaan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya.<sup>66</sup>
- 2) Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun

---

<sup>65</sup> Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 424.

<sup>66</sup> Pasal 330 KUHPerdata

mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya.<sup>67</sup>

- 3) Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.<sup>68</sup>
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.<sup>69</sup>

### C. Perubahan Hukum

Perubahan hukum akan mengikuti dan bergantung kepada perubahan sosial dalam fungsi hukum sebagai *reflector*, dimana hukum harus merefleksi keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral. Dalam konteks hubungan perubahan hukum dan perubahan sosial tersebut, Podgorecki menjelaskan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Integrasi*, yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat.

---

<sup>67</sup> Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>68</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>69</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

- 2) Fungsi *Petrifikasi*, yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.
- 3) Fungsi *Reduksi*, yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan tertentu.
- 4) Fungsi *Memotivasi*, yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.
- 5) Fungsi *Edukasi*, yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.<sup>70</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan telah dijelaskan definisi tentang landasan fisiologis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:<sup>71</sup>

Landasan Filosofis, adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana

---

<sup>70</sup> Yuddin Chandra Nan Arif. *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*. Jurnal IUS | Vol I | Nomor 1 | April 2013. 114

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

landasan sosiologis adalah: pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan yuridis adalah: pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain; peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta; Kansius, 2007). 108.

**BAB III**

**KETENTUAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19  
TAHUN 2018 PASAL 11 TENTANG PENGHAPUSAN BATAS  
USIA *BÂLIGH* SEBAGAI SYARAT WALI DALAM  
PERNIKAHAN DAN DAMPAKNYA**

**A. Sekilas tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018**

**1. Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.**

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Pencatatan Perkawinan yaitu Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018. Peraturan Menteri Agama ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Terdapat perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama sebelumnya tentang Pencatatan Nikah, menjadi Pencatatan Perkawinan, hal ini karena disesuaikan istilahnya dengan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan disahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 27 Agustus 2018, mulai berlaku dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang

Pencatatan Perkawinan ini penting bagi yang akan menikah atau membutuhkan informasi tentang perkawinan tentunya.<sup>73</sup>

Adapun latar belakang pertimbangan Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan ini adalah bahwa:

- a. untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan;<sup>74</sup>

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan nikah adalah peraturan perundangan yang disusun secara sistematis. Didalamnya terdapat 21 Bab yang terdiri dari 46 Pasal.

## **2. Kedudukan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Dalam sistem hukum di Indonesia, Dalam sistem hukum di Indonesia, proses pembuatan Undang-Undang yang

---

<sup>73</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018

<sup>74</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018



selama ini dinaungi oleh beberapa peraturan kini mengacu pada satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d) Peraturan Pemerintah;
  - e) Peraturan Presiden;
  - f) Peraturan Daerah Provinsi
  - g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>75</sup>
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1.<sup>76</sup>

Maka dalam hal ini jika Pasal 7 ayat 1 tersebut dipahami seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan

---

<sup>75</sup> Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>76</sup> Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

bersifat *limitatif* atau terbatas, hanya berjumlah 7 (tujuh) yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berarti diluar dari keenam jenis tersebut sepertinya bukan dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Pasal 7 ayat 2 tersebut semakin memperkuat bahwa hanya ke 7 peraturan tersebutlah hierarki indonesia. Dengan demikian apakah Peraturan Menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum ? Bagaimana sebenarnya kedudukan Peraturan Menteri dalam Peraturan Perundang-undangan ?

Peraturan Menteri memang tidak diatur pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun Jika kita lihat pada pasal selanjutnya yaitu:

Pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-

Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>77</sup>

Pasal 8 ayat 2 menjelaskan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebut pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>78</sup>

Dari ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 diatas menunjukan bahwa Peraturan Menteri termasuk salah satu Peraturan Perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Lembaga/Pejabat Negara yang berwenang dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Lembaga/Pejabat Negara baik di Pusat dan Daerah. Setiap Lembaga/Pejabat Negara tertentu dapat diberikan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang.

---

<sup>77</sup> Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

<sup>78</sup> Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

Kewenangan yang diberikan atau dipunyai oleh lembaga atau pejabat itu dapat berbentuk kewenangan *atributif* atau kewenangan *delegatif/derivatif*. Kewenangan *atributif* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada lembaga atau pejabat tertentu, atau kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan *delegatif/derivatif* adalah kewenangan yang diberikan oleh pemegang kewenangan *atributif* kepada pejabat atau lembaga tertentu dibawahnya, untuk mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemegang kewenangan *atributif*.<sup>79</sup>

Keputusan Menteri itu harusnya di bawah Keputusan Presiden karena menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak dicantumkannya Peraturan Menteri atau jenis-jenis peraturan perundang-undangan lainnya di dalam hierarki. Peraturan Menteri sebagai salah satu instrumen hukum masih diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan

---

<sup>79</sup>Sadu Wasistiono,Dkk, Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa, Fokus media, 22.

perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa menteri dapat membuat peraturan walaupun pendelegasian tersebut tidak secara tegas atau tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya, Menteri dapat menetapkan peraturan yang tidak merupakan delegasi peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Peraturan menteri ini biasa disebut peraturan menteri mandiri, termasuk dalam peraturan kebijakan.<sup>80</sup>

Dalam pembentukan Peraturan Menteri, berlaku prinsip bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapuskan atau mencabut peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah. Dalam hal peraturan yang sederajat bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya (dalam arti sejenis), maka berlaku peraturan yang terbaru dan peraturan yang lama dianggap telah dikesampingkan (*lex posterior derogat legi priori*). Jika peraturan yang mengatur hal yang merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan yang mengatur hal khusus tersebut (*lex specialis derogat legi generalis*). Namun, bila secara hirarkhi peraturan perundang-undangan yang ada dijenjang yang lebih

---

<sup>80</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berada pada jenjang lebih tinggi. Dan seterusnya sesuai dengan hirarkhi norma dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini maka yang digunakan adalah asas *Lex Superior derogat legi Inferior*. Pembentuk peraturan perlu bersepakat bahwa *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis* didasarkan pada hal yang sejenis.<sup>81</sup>

Maka sesuai dengan jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 kedudukan Peraturan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan yang bisa dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang dan lembaga.

### **3. Ketentuan Baligh Sebagai Syarat Wali Nikah dalam Pernikahan Menurut Peraturan Menteri Agama Nomer 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Nomer 19 Nomer 2018**

Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ini merupakan

---

<sup>81</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135-136.

penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Salah satu bentuk penyempurnaannya adalah penetapan ketentuan tentang persyaratan wali nasab dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hukum Islam wali adalah salah satu rukun (akad) nikah, selain calon pengantin laki-laki, dua saksi, dan ijab-qabul. Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan pernikahan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah, batal.<sup>82</sup>

Dikarenakan keberadaan wali nikah sangatlah penting dan menurut jumhur ulama termasuk dalam rukun pernikahan, maka dari itu wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (peraturan sebelumnya) , memberipersyaratan bagi wali (nasab) nikah diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. *Bâligh* , berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan

---

<sup>82</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 94.

6. Dapat berlaku adil.<sup>83</sup>

Pada poin ketiga terdapat ketentuan yang menyaratkan wali nasab harus *bâligh* yang mempunyai batas umur yaitu 19 tahun. Jika calon wali nasab dalam pernikahan tersebut belum mencapai 19 tahun maka belum dapat menjadi wali.

Kemudian diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. *Bâligh* ;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.<sup>84</sup>

Dalam kedua peraturan tersebut tidak terdapat perubahan yang signifikan, perubahan tersebut hanya terletak pada poin ketiga tentang kata *bâligh*. *Bâligh* pada peraturan ini sudah tidak ada lagi batas umur yang mengikat. Jika berpatokan dengan hukum Islam, *bâligh* hanya berpatokan pada mimpi basah bagi laki-laki dan keluar haid pada perempuan. Dengan adanya hal

---

<sup>83</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

<sup>84</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018



tersebut umur berapapun bisa menjadi wali nasab pada pernikahan asalkan sudah mimpi basah bagi laki-laki.

Peraturan Menteri Agama sebelumnya dalam menentukan usia baligh sebagai syarat wali nasab relatif lebih mudah dikarenakan adanya batas umur yang sudah konkrit yaitu minimal 19 tahun namun dengan adanya Peraturan Menteri Agama yang baru Peraturan Menteri Agama Nomer 19 tahun 2018 mengakibatkan peraturan syarat wali tersebut menjadi kabur dikarenakan hilangnya patokan umur tersebut dan secara tidak langsung akan berdampak kepada lembaga pelaksana peraturan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama ( KUA ) dan penghapusan batas umur tersebut dapat memungkinkan wali nikah dapat dilakukan oleh anak-anak, yang menurut perundang-undangan yang berlaku dianggap tidak sah dalam melakukan tindakan hukum. Menurut penulis perubahan tersebut bisa menimbulkan persoalan baru. Dan ketentuan itulah yang selanjutnya akan penulis analisa dalam bab berikutnya.

## **B. Dampak Dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* Sebagai Syarat Wali Bagi KUA Dalam Menentukan Wali Nasab Dalam Pernikahan**

### **1. Tanggapan Para Penghulu Terhadap Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia Baligh Sebagai Syarat Wali**

Dari pemaparan sebelumnya dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 memberi ketentuan syarat wali nasab salah satunya adalah *bâligh* tanpa ada ketentuan umur tidak seperti Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 yang mencantumkan *bâligh* sekurang-kurangnya 19 tahun. Sedangkan dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikatakan *bâligh* harus mempunyai banyak kriteria dimana masing –masing peraturan berbeda-beda. Dengan perbedaantersebut akan berdampak dan membuat badan pelaksana peraturan tersebut dalam hal ini yaitu petugas KUA (Kantor Urusan Agama) akan kebingungan. Petugas KUA mau tidak mau harus mempunyai patokan sendiri dalam menentukan wali nikah tersebut, dan pasti ada perbedaan antara KUA satu dengan KUA yang lain.

Disini penulis akan mencantumkan hasil wawancara kepada para penghulu di lima KUA (Kantor Urusan Agama) di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang yang diambil secara acak mengenai Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 pasal 11 tentang syarat wali nikah. Diantara hasil wawancara kepada para penghulu sebagai berikut;

Menurut Bapak Choirul Anwar,<sup>85</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengenai pasal-pasal yang diganti atau pun yang ditambahkan bahwa belum sepenuhnya disosialisasikan kepada semua KUA (Kantor Urusan Agama). Jika petugas KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut kurang aktif atau kurang teliti maka tidak akan menyadari akan adanya perubahan didalamnya. Bapak Ngadiono,<sup>86</sup> menambahkan bahwa ada beberapa peraturan baru yang akan menimbulkan permasalahan baru yaitu salah satunya mengenai syarat wali nasab dalam pernikahan. Pada Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 pada poin ketiga menyatakan bahwa syarat wali nasab adalah *bâligh*. Sebenarnya syarat tersebut biasa saja. *Bâligh* sendiri jika dilihat dari kacamata Islam untuk laki-laki adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun menurut Bapak Slamet<sup>87</sup> hal tersebut akan menimbulkan permasalahan berupa keraguan dalam diri penghulu jika dilakukan oleh anak-anak yang mengaku sudah *bâligh* atau sudah mimpi basah. Menurut bapak Choirul Anwar, jika penentuan *bâligh* hanya berdasarkan pengakuan maka akan memungkinkan terjadi kebohongan.

---

<sup>85</sup>Wawancara dengan Bapak Choirul Anwar Penghulu KUA Kecamatan Sumowono, tgl 5 juli 2019 pkl 14.00.

<sup>86</sup>Wawancara dengan Bapak Ngadiono Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan, tgl 15 juli 2019 pkl 14.00.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak Slamet Penghulu KUA Kecamatan Mijen, tgl 15 Juli 2019 pkl 13.00

Menurut, Bapak Mohammad Hasan Bisri<sup>88</sup> menyatakan bahwa mengenai syarat wali nikah, lebih mudah ketika ada peraturan yang sudah ada umur pastinya yaitu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 sekurang-kurangnya 19 tahun dikarenakan pengindentifikasinya relatif mudah dan jelas. Sedangkan Peraturan Menteri Agama yang sekarang yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 hanya memberi syarat wali nikah yaitu *bâligh* yang akan menimbulkan efek bias pada peraturan tersebut. Selain itu menurut bapak Teo Briliyanto<sup>89</sup> di Indonesia sendiri mempunyai banyak regulasi batas umur yang berbeda-beda sehingga membingungkan para penghulu harus menggunakan patokan yang mana. Jadi hampir semua penghulu mempunyai jawaban yang sama yaitu cenderung memilih peraturan yang mempunyai batas umur dikarenakan akan mempermudah bagi mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menentukan usia dewasa para penghulu juga terdapat perbedaan, ada yang menganggap 19 tahun sudah dewasa, ada juga yang menganggap 21 tahun baru bisa dikatakan dewasa. Seperti pendapat Bapak Teo Briliyanto,<sup>90</sup> Bapak Hasan

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan Bapak Mohammad Hasan Bisri Penghulu KUA Kecamatan Gunungpati, tgl 16 juli 2019 pkl 15.00

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Teo Briliyanto Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Barat, tgl 16 juli 2019 pkl 14.00

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Teo Briliyanto Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Barat, tgl 16 juli 2019 pkl 14.00

Bisri<sup>91</sup> dan Bapak Choirul Anwar,<sup>92</sup> mereka cenderung lebih setuju pada peraturan sebelumnya dan mereka menganggap umur 19 tahun sudah dapat dikatakan dewasa karena pengaruh perkembangan zaman dan pendidikan yang semakin modern ini. Untuk yang beranggapan 21 tahun yaitu bapak Ngadiono<sup>93</sup> beliau sangat berhati-hati dalam menentukan wali nasab bahkan beliau cenderung ke wali hakim lah yang berhak menjadi wali nikah ketika tidak ada ayah kandung dari calon mempelai perempuan. Selain itu beliau juga berpendapat demi menghindarkan dari keragu-raguan, oleh karena itu beliau memilih angka tertinggi yaitu umur 21 tahun untuk bisa dikatakan dewasa. Pendapat umur 21 tahun juga diikuti oleh bapak Slamet.<sup>94</sup>

Meskipun para penghulu tidak sepenuhnya setuju dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut, mau tidak mau para penghulu harus tetap melaksanakan peraturan tersebut. Semisal ada kasusseorang anak atau adek dari calon mempelai wanita ingin menjadi wali nikah bagi kakaknya, para penghulu akan mengidentifikasi terlebih dahulu apakah layak menjadi wali atau

---

<sup>91</sup>Wawancara dengan Bapak Mohammad Hasan Bisri Penghulu KUA Kecamatan Gunungpati, tgl 16 juli 2019 pkl 15.00

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bapak Choirul Anwar Penghulu KUA Kecamatan Sumowono, tgl 5 juli 2019 pkl 14.00.

<sup>93</sup>Wawancara dengan Bapak Ngadiono Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan, tgl 15 juli 2019 pkl 14.00.

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Slamet Penghulu KUA Kecamatan Mijen, tgl 15 Juli 2019 pkl 13.00

tidak. Biasanya Bapak Teo Brilianto<sup>95</sup> dan Bapak Mohammad Hasan Bisri<sup>96</sup> mengidentifikasi dengan cara melihat keperawakan dan tingkah laku calon wali tersebut, jika dirasa layak maka calon wali tersebut berhak menjadi wali nikah untuk kakaknya. Namun berbeda dengan Bapak Ngadiono,<sup>97</sup> Jika terjadi sesuatu kasus yang sama yaitu anak atau adik dari mempelai wanita yang ingin menjadi wali nikah beralasan sudah mimpi basah, Bapak Ngadiono pribadi tidak berani menentukan apakah boleh atau tidak anak tersebut menjadi wali dalam pernikahan, beliau cenderung memilih wali hakim lah yang bertindak sebagai wali nikah dari pada anak tersebut.

## **2. Dampak Dari Ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* Sebagai Syarat Wali Menurut Para Penghulu**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan.<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak Teo Briliyanto Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Barat, tgl 16 juli 2019 pkl 14.00

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Mohammad Hasan Bisri Penghulu KUA Kecamatan Gunungpati, tgl 16 juli 2019 pkl 15.00

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Ngadiono Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan, tgl 12 juli 2019 pkl 14.00.

<sup>98</sup> Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 234

Menurut Penghulu mengenai dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 11 adalah sebagai berikut;

*Pertama*, umur berapapun dapat berkesempatan menjadi wali asalkan sudah mimpi basah. Menurut Bapak Ngadiono<sup>99</sup> yaitu dengan tidak adanya batas umur dalam peraturan tersebut mengakibatkan peraturan menjadi longgar sehingga umur berapapun akan berkesempatan menjadi wali nikah asal sudah mimpi basah dan bagi penghulu akan timbul keraguan jika wali dilakukan oleh anak-anak. Bapak Choiril Anwar<sup>100</sup> juga memberi pendapat yaitu Sisi positifnya peraturan tersebut adalah umur berapapun asal sudah mimpi basah dapat berkesempatan menjadi wali.

*Kedua*, timbul multi tafsir. Menurut Bapak Slamet,<sup>101</sup> yaitu akan terjadi perbedaan penafsiran kata baligh antara penghulu satu dengan penghulu lain dikarenakan tidak ada patokan yang pasti

*Ketiga*, peraturan menjadi kabur atau bias. Menurut Bapak Teo Briliyanto<sup>102</sup>, Peraturan tersebut menjadi kabur atau

---

<sup>99</sup>Wawancara dengan Bapak Ngadiono Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan, tgl 15 juli 2019 pk1 14.00

<sup>100</sup>Wawancara dengan Bapak Choirul Anwar Penghulu KUA Kecamatan Sumowono, tgl 5 juli 2019 pk1 14.00.

<sup>101</sup>Wawancara dengan Bapak Slamet Penghulu KUA Kecamatan Mijen, tgl 15 Juli 2019 pk1 13.00

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak Teo Briliyanto Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Barat, tgl 16 juli 2019 pk1 14.00

bias dikarenakan patokan umur yang awalnya ada sekarang dihapus. Bapak Mohammad Hasan Bisri,<sup>103</sup> peraturan penentuan usia wali menjadi tidak pasti dikarenakan hanya berdasarkan kira-kira

*Keempat*, timbul keraguan dalam menentukan wali nikah tersebut. Menurut Bapak Ngadiono, akan menimbulkan keraguan jika perwalian tersebut dilakukan oleh anak-anak

*Kelima*, menimbulkan pandangan yang berbeda antara penghulu. Menurut Bapak Slamet<sup>104</sup> yaitu akan terjadi perbedaan penafsiran kata baligh antara penghulu satu dengan penghulu lain. Mesti masing-masing penghulu punya cara tersendiri dalam menentukan hal tersebut bahkan latar belakang penghulu tersebut dapat mempengaruhi keyakinan dalam menentukan baligh tersebut

*Keenam*, memberi peluang kepada calon wali tersebut untuk berbohong. Menurut Bapak Choiril Anwar<sup>105</sup> yaitu dalam penentuan wali kemungkinan untuk berbohong itu ada jika hanya berdasarkan pengakuan.

---

<sup>103</sup>Wawancara dengan Bapak Mohammad Hasan Bisri Penghulu KUA Kecamatan Gunungpati, tgl 16 juli 2019 pkl 15.00

<sup>104</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet Penghulu KUA Kecamatan Mijen, tgl 15 Juli 2019 pkl 13.00

<sup>105</sup>Wawancara dengan Bapak Choirul Anwar Penghulu KUA Kecamatan Sumowono, tgl 5 juli 2019 pkl 14.00



## **BAB IV**

### **Analisis Terhadap Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Baligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan Dan Dampaknya**

#### **A. Analisis Hukum Positif terhadap Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Syarat Wali dalam Pernikahan**

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dalam pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Syarat wali nasab adalah:

1. Laki-laki;
2. Beragama Islam;
3. *Bâligh*;
4. Berakal;
5. Merdeka; dan
6. Dapat berlaku adil.<sup>106</sup>

Menurut penulis jika dilihat dari sisi landasan filosofis yang tercantum pada konsiderans huruf a peraturan tersebut untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam nampaknya belum tercemin dalam pasal 11 ini dikarenakan pada poin ketiga justru akan bersifat multi tafsir.

---

<sup>106</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi landasan sosiologis yang tercantum pada konsiderans huruf b peraturan tersebut, menganggap bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan. Menurut penulis konsiderans nomor b tersebut bisa jadi, hal yang mendasari akan adanya perubahan yang pada pasal 11 ini. Dengan adanya pembatasan umur pada peraturan sebelumnya seakan-akan *bâligh* adalah 19 tahun sehingga bagi masyarakat yang hendak menjadi wali nikah namun belum umur 19 tahun maka menjadi tidak boleh. Oleh karena itu pemerintah memberi terobosan baru atau penyempurnaan pada peraturan ini yaitu dengan dihapuskannya batas umur tersebut sehingga secara tidak langsung akan memberi sifat fleksibel dengan harapan masyarakat akan dipermudah akan hal tersebut.

Selanjutnya, jika dilihat dari sisi landasan yuridis yang tercantum pada konsiderans huruf c peraturan tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan. Menurut penulis, hal yang mendasar akan adanya perubahan pada pasal 11 tersebut adalah pada pertimbangan huruf b yaitu menyempurnakan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 18 dan mengakomodir kebutuhan masyarakat yang hendak menjadi wali nikah.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 merupakan terobosan baru yaitu tidak ada lagi pembatasan umur lagi mengenai ketentuan *bâligh* sehingga peraturan tersebut bersifat fleksibel namun menurut penulis, jika syarat *bâligh* tersebut dikaitkan dengan regulasi peraturan yang ada di Indonesia akan mengakibatkan *bâligh* tersebut belum bisa dikatakan cakap hukum dikarenakan belum mencapai umur tertentu.

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberi batas usia dewasa ketika 18 tahun. Sehingga secara *a contrario* atau *mafhum mukhalafah*, seseorang yang belum berusia 18 tahun dianggap belum dewasa. Ia belum cakap bertindak hukum. Dalam perspektif ini, jelas ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang *Bâligh* sebagai syarat wali nikah ada dua kemungkinan jika seseorang atau calon wali nikah tersebut telah *bâligh* namun masih dibawah usia 18 tahun maka orang tersebut bisa dianggap tidak cakap hukum. Dan memungkinkan untuk pembatalan hukum. Namun jika seseorang atau calon wali nikah tersebut telah *bâligh* dan berusia 18 tahun keatas maka calon wali nikah tersebut termasuk cakap hukum dan bisa menjadi wali.

Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 terdapat kesamaan dalam sudut pandang syarat wali nikahnya yaitu pada pasal 20 ayat (1) hanya memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim,

(2) akil, dan (3) *bâligh*.<sup>107</sup> Pasal tersebut sama-sama menyebutkan kata *bâligh*. Namun pada Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam justru menjelaskan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi secara tidak langsung Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan umur saat wali nikah dikatakan *bâligh* harus berumur minimal 21 tahun. Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dengan Kompilasi Hukum Islam maka seseorang dapat dikatakan cakap hukum adalah *bâligh* yang sudah berumur 21 tahun. Jika dibawah umur 21 tahun dapat dikatakan tidak sah.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan tentang batas usia yaitu belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin (Pasal 330 KUHPer.). Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dengan KUHPer ini maka *bâligh* tersebut harus mencapai umur 21 tahun, jika tidak maka *bâligh* tersebut belum bisa dikatakan cakap hukum.

Menurut penulis, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 sekarang cenderung lebih luas bahkan umur 12 tahun pun sudah dapat menjadi wali nikah asalkan sudah mimpi basah. Jika melihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menunjukan umur 12 tahun masih tergolong anak kecil yang

---

<sup>107</sup> Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

masih membutuhkan perlindungan dari wali, kemudian bagaimana mungkin umur 12 tahun bisa menjadi wali sedangkan dia masih membutuhkan wali.

Pakar Neuropsikologi bernama Elizabeth Sowell menyebutkan bahwa saat usia seseorang belum mencapai 17 tahun, di dalam otaknya, tepatnya pada bagian *lobus fronta*, belum benar-benar mengalami perkembangan hingga sempurna. Padahal, bagian lobus *fronta* memiliki peran besar dalam mengatur perencanaan, mengorganisasi berbagai hal, dan menjalankan antisipasi. Hurlock (1990) mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun samapi kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Selain itu dikatakan dewasa bila telah memiliki kekuatan tubuh secara maksimal, siap memproduksi, dan telah dapat diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor, serta dapat diharapkan memainkan peranannya bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat.<sup>108</sup>

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 jika dikaitkan dengan ketentuan *bâligh* atau dewasa pada hukum positif di Indonesia seperti Undang-undang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam akan nampak berbeda

---

<sup>108</sup>Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta : Erlangga. 1994)

bahkan tidak ada sinkronisasi peraturan umur antara satu dengan yang lain.

Dalam sistem hukum jika terjadi gesekan di antara norma hukum maka asas hukum digunakan untuk memecah kebuntuan. Dalam konteks konflik antar-peraturan perundang-undangan, asas-asas yang relevan untuk digunakan adalah *lex superior derogat legi inferior* (aturan yang lebih tinggi mengalahkan aturan yang lebih rendah); *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang lebih spesifik mengalahkan aturan yang lebih umum); *lex posterior derogat legi priori* (aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lama).<sup>109</sup>

Menurut penulis *asas lex superior derogat legi inferior* dapat diterapkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam dikarenakan dalam hirarki perundang-undangan posisi Peraturan Menteri Agama terletak lebih tinggi dibandingkan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 akan mengandung *asas lex posterior derogat legi priori* sehingga akan mengalahkan peraturan yang lama.

Menurut penulis, jika ditinjau sebagai pedoman pencacatan perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dapat menerapkan *asas lex specialis derogat legi generalis* terhadap

---

<sup>109</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 135-136.

peraturan hukum positif lain sehingga mempunyai daya laku sebagai hukum yang berlaku di Indonesia.

**B. Analisis Dampak dari Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penghapusan Batas Usia *Bâligh* Syarat Wali dalam Pernikahan Bagi KUA dalam Menentukan Wali Nasab dalam Pernikahan**

Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata *impact*. Makna *impact* dalam Bahasa Inggris ialah tabrakan badan ; benturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak berarti benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).<sup>110</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pada bab 3, Peraturan Menteri Agama tersebut termuat 6 dampak diantaranya ;

- a) Umur berapapun dapat berkesempatan menjadi wali asalkan sudah mimpi basah.

Menurut penulis jika merujuk pada hadis Nabi SAW.

عن عائشة وعلى ابن طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم (رواه البخاري، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه، والد رقطني)

Artinya: “Dari Aisyah dan Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda: terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia

---

<sup>110</sup>Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta; Rajawali Pers 2005) 427

*bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan air mani (ihtilam)”* (Hadits Riwayat al Bukhori, Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasai, Ibnu Majah, dan al Daruquthni).<sup>111</sup>

Menurut hadis tersebut, anak-anak yang sudah bermimpi dan mengeluarkan mani (ihtilam) sudah dapat dikatakan *bâligh* atau dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Maka tidak harus menunggu umur 18 tahun sudah berkesempatan menjadi wali asalkan sudah mimpi basah, ditambah lagi di era modern ini, banyak teknologi canggih dan makanan yang bergizi sehingga memudahkan seseorang atau anak-anak dapat mencapai mimpi basah lebih cepat, bahkan umur 10 tahun dapat mimpi basah, sehingga mulai umur 10 tahun ke atas dapat berkesempatan menjadi wali. Menurut penulis lebih tepatnya adalah ketentuan wali nasab dalam pernikahan akan bersifat fleksibel atau tidak kaku. Maksudnya tidak kaku adalah tidak berpatokan umur lagi.

b) Timbul multi tafsir,

Menurut penulis hal tersebut benar adanya, dikarenakan para penghulu menafsirkan dewasa berbeda-beda ada yang mengatakan 18 tahun sudah dewasa, ada juga yang mengatakan 21 tahun baru dikatakan dewasa

---

<sup>111</sup>Al-San’any, *Subul-Salam*, juz 3, (Kairo : Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M), 179.



- c) Peraturan menjadi kabur atau bias.

Menurut penulis, setuju dengan dampak tersebut dikarenakan untuk menentukan calon wali sekarang ini harus satu-persatu atau menyesuaikan kasusnya, berbeda dengan peraturan yang dulu yang ada batas umurnya yaitu 19 tahun, sehingga jika ada calon wali cukup melihat umur calon wali tersebut.

- d) Timbul keraguan dalam menentukan wali nikah tersebut,

Menurut penulis, pada dasarnya jika perwalian dilakukan oleh ayah kandungnya maka tidak akan ada lagi keraguan dalam menentukan wali nasab, namun jika dilakukan oleh anak-anak keraguan itu akan muncul dikarenakan anak-anak yang mengaku sudah mimpi basah namun dapat dikatakan cakap hukum

- e) Timbul pandangan yang berbeda antara penghulu

Menurut penulis, hal ini kembali lagi kepada hilangnya patokan umur tersebut, sehingga penghulu harus mengidentifikasi lagi calon wali tersebut, penghulu satu dengan penghulu lain mesti terjadi perbedaan, ada yang sangat kritis atau berhati-hati dalam menentukan calon tersebut, ada juga yang santai atau tidak terlalu saklek sehingga lebih longgar dalam menentukan wali tersebut.

- f) Memberi peluang kepada calon wali tersebut untuk berbohong.

Menurut penulis untuk peluang berbohong demi ingin menjadi wali penulis rasa sedikit, untuk mencapai drajat *bâligh*

atau mimpi basah saat ini sangat lah mudah dikarenakan pengaruh teknologi yang canggih sehingga dapat mengakses semua hal yang kita inginkan, selain itu banyak makanan-makanan yang mengandung banyak gizi yang menyebabkan percepatan dalam mimpi basah.

Dampak menurut JE. Hosio<sup>112</sup> adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy<sup>113</sup> dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan dampak diatas menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

---

<sup>112</sup>J.E Hosio, *Kebijakan Publik &Desentralisasi : Esai-esai dari Sorong*. (Yogyakarta : Laksbang Yogyakarta. 2007), 57.

<sup>113</sup>Irfan Islamy.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*.(Jakarta: Bina Aksara, 2003), 115.

### 1) Dampak Positif

- Penentuan wali nikah menjadi fleksibel atau tidak kaku lagi sehingga meskipun belum umur 19 tahun, boleh menjadi wali nikah dengan syarat sudah termasuk katagori *bâligh* .

### 2) Dampak Negatif

- Timbul multi tafsir
- Peraturan menjadi kabur atau bias,
- Timbul keraguan dalam menentukan wali nikah tersebut,
- Menimbulkan pandangan yang berbeda antara penghulu,

Penulis lebih setuju jika Peraturan Menteri Agama tersebut dicantumkan umur karena hal tersebut akan mempermudah kinerja penghulu di masing-masing KUA.

Sebagaimana pendapat Ahmad Azhar Basyir,<sup>114</sup> akan lebih tepat apabila penentuan kedewasaan itu tidak hanya dibatasi dengan kriteria baligh, tetapi juga mengikutsertakan faktor rusyd (kematangan pertimbangan akal/mental). Untuk menentukan waktu seseorang dipandang matang atau rusyd, menurut Basyir, dapat diadakan penelitian terhadap orang-orang antara umur 15 dan 25 tahun. Kemudian diambil angka rata-rata, kapan seseorang itu dipandang telah rusyd. Mungkin, akan ditemukan angka umur 19, 20, atau 21 tahun, yang kemudian dijadikan

---

<sup>114</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2004, . 31

stándar baku untuk menentukan batas kedewasaan tersebut. Sementara itu di sisi lain, dalam literatur fiqh dikenal adanya satu mazhab yang mensyaratkan wali nikah harus sudah rusyd, tidak cukup sudah baligh. Mazhab tersebut adalah mazdhab Hanbali.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al- 'ala al-Mazahib al- 'Arba'ah*, Misr : al-Maktabah at- Tijariyyatal-Kubra, 1969, Juz IV, . 28.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukaan dalam babsebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban pokok dalam permasalahan ini:

1. ketetapan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 jika dikaitkan dengan ketentuan *bâligh* atau dewasa pada hukum positif di indonesia seperti Undang-undang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam akan nampak berbeda bahkan tidak ada sinkronisasi peraturan umur antara satu dengan yang lain. Namun jika ditinjau sebagai pedoman pencacatan perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dapat menerapkan *asas lex specialis derogat legi generalis* terhadap peraturan hukum positif yang lain sehingga mempunyai daya laku sebagai hukum yang berlaku diindonesia.
2. Dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang syarat wali nasab yang hanya tercantum *bâligh* adalah sebagai berikut:Dampak Positif yaitu , umur berapapun berkesempatan menjadi wali asalkan sudah mimpi basah. Dampak Negatifnya adalah sebagai berikut: *Pertama*, akan menimbulkan multi tafsir *Kedua*, peraturan menjadi kabur atau bias, *Ketiga*, timbul keraguan dalam menentukan wali nikah

tersebut, *keempat*, menimbulkan pandangan yang berbeda antara penghulu, *Kelima*, memberi peluang kepada calon wali tersebut untuk berbohong.

## **B. Saran**

Adapun saran menurut penulis adalah:

1. Hendaknya pemerintah dapat mengkaji lagi peraturan-peraturan yang mengisyaratkan umur dan memberi patokan yang sama dan pasti agar tidak terjadi ketimpangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain.
2. Idealnya pembentukan Peraturan Menteri Agama ini salah satu mencapai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Sehingga implementasi Peraturan Menteri Agama dapat dilaksanakan lembaga KUA dengan baik

## **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan *rahmat* dan *taufiq*-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena

itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

## Daftar Pustaka

- Adib. Ahmad, “*Study Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Anak menjadi Wali Nikah Ibunya*”, Skripsi, Semarang, Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2008.
- Ahmad Warson Munawwir *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, cet. 25, 2002.
- Ahmad. La Ode Ismail, *Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhaddidan Kontemporer*, Jurnal al Mayyiah, Vol 8 No. 1 januari-juni 2015
- Al –Asqalani. Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Nurul Huda.
- Al Qazwani. Muhammad bin Yazid, *Sunnan Ibn Majah*, Juz. I, Beirut: Dal al Fikr.
- Al Zuhayli. Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar al Fikr, 1989.
- Ali. Mukti, “*Kedewasaan Menurut Al-qur’an*”. Rumah Kitab, Juni 2016
- Al-Jaziri. Abdurrahman, *al-Fiqh „ala Madzahibil„Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Darl Al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-Jaziri. Abdurrahman, *al-Fiqhala MadzahibilArba’ah*, Juz IV, Beirut: Darl Al-Kutb al-Ilmiyah.
- Al-San’any, *Subul-Salam*, juz 3, Kairo : Dar Ihya’ al-Turas al-Araby, 1379 H/1980 M.
- Arif. Yuddin Chandra Nan. *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*. Jurnal IUS | Vol I | Nomor 1 | April 2013.



Asikin. Amirudin Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

As-syafii, *Al-Umm*, Beirut ; Dar al Kutub almiyah, Juz 5.

Basyir. Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007.

E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta : Erlangga. 1994

Hosio. J.E., *Kebijakan Publik &Desentralisasi : Esai-esai dari Sorong*. Yogyakarta : Laksbang Yogyakarta. 2007.

Imron HS. Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang; CV.Karya Abadi Jaya, 2015.

Indrati S. Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta; Kansius, 2007.

Islamy. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 2003.

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Latif. Abdul, “*Batas Usia Bâligh Syarat Saksi Nikah (Analisi Hukum Islam terhadap Batas Bâligh Syarat Saksi Nikah dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)*” Skripsi, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2013.

Madani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta; Prenadia Group, 2016.

Mughniyyah. Muhammad Jawad , *Al-Fiqh a'la al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut : Dar alJawad.

Munawwir. Ahmad Warson , *Al MUNAWWIR Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, cet. 25, 2002.

Muslih. Agus, “*Studi Analisis terhadap Pasal 18 PERATURAN MENTERI AGAMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan*”. Skripsi, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2011

Mutmainah. Fitriyatul,”*Pengulangan akad nikah dengan wali di bawah umur (studi kasus di kecamatan Plantungan kabupaten Kendal)*”. Skripsi, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2014.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Rasjid. Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung:Sinar Baru Algensindo, cet. 46, 2010.

Rofiq. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Rohmah. Nailur, “*Pelaksanaan Batasan Usia Wali Nasab Menurut Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Pasal 18 (2) Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*”Skripsi, Surabaya, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunah*, terj. Khairul Amru Harahap, dkk. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

Soekanto. Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; Rajawali Pers 2005.

Soeroso. R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Subagyo. P. Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Surachman. Winarno, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah: Dasar, Metode, Tekhnik*, Bandung: Tarsito, 1998.

Syarifuddin. Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wasistiono. Sadu, Dkk, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa Ke Masa*, Fokus media.

Wawancara dengan Bapak Choirul Anwar Penghulu KUA Kecamatan Sumowono, tgl 5 juli 2019 pk1 14.00.

Wawancara dengan Bapak Mohammad Hasan Bisri Penghulu KUA  
Kecamatan Gunungpati, tgl 16 juli 2019 pk1 15.00

Wawancara dengan Bapak Ngadiono Penghulu KUA Kecamatan  
Ngaliyan, tgl 15 juli 2019 pk1 14.00.

Wawancara dengan Bapak Slamet Penghulu KUA Kecamatan Mijen, tgl  
15 Juli 2019 pk1 13.00

Wawancara dengan Bapak Teo Briliyanto Penghulu KUA Kecamatan  
Ungaran Barat, tgl 16 juli 2019 pk1 14.00

# LAMPIRAN

Wawancara Terhadap Penghulu Megenai Peraturan Menteri Agama

Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Ngadiono S.H

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan

Hari/tanggal : Senin, 15 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Menurut beliau ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kondisi KUA setempat. Diantaranya adalah sebagai berikut: P4 ( Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan), Pendaftaran Nikah maksimal 10 hari kerja, SIMKAH Online ( terlaksana namun ada kendala ), Pencetakan kartu nikah ( terlaksana namun belum menyeluruh ) dan Syarat wali nasab

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Guna menghindari keraguan beliau cenderung memilih angka tertinggi yaitu umur 21 tahun atau setara dengan umur mempelai pria.

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh* ?

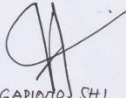
*baligh* menurut islam hanya ditentukan dengan mimpi basah bagi laki-laki. Jika terjadi sesuatu kasus anak atau adik dari mempelai wanita yang ingin menjadi wali nikah beralasan sudah mimpi basah, Bapak Ngadiono pribadi tidak berani menentukan apakah boleh atau tidak anak tersebut

menjadi wali dalam pernikahan, beliau cenderung memilih wali hakim lah yang bertindak sebagai wali nikah dari pada anak tersebut.

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Untuk dampak paling utama menurut beliau adalah umur berapapun akan berkesempatan menjadi wali nikah asal sudah mimpi basah dan bagi penghulu akan timbul keraguan jika wali dilakukan oleh anak-anak.

Narasumber

  
AGAPITO SHI  
(.....)

Wawancara Terhadap Penghulu Mengenai Peraturan Menteri Agama  
Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Teo Briliyanto S.Hi  
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Barat  
Hari/tanggal : Senin, 16 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Menurut beliau mengenai PMA nomor 19 tahun 2018 tentang syarat wali nikah bahwa sebaiknya pemerintah memberikan batas umur seperti peraturan sebelumnya PMA nomor 11 tahun 2007 dikarenakan di Indonesia sendiri banyak regulasi batas umur yang berbeda-beda sedangkan di fiqih islam cukup keluar air mani sudah dikatakan *Baligh*.

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Beliau cenderung setuju dengan peraturan sebelumnya yaitu ada batas umur 19 tahun.

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh* ?

Menurut beliau kemungkinan terjadi wali dibawah umur itu kecil, namun jika terjadi kasus seperti itu beliau cenderung melihat fisik terdahulu dan melihat tingkah laku dan berbicaranya, jika dirasa layak maka calon wali tersebut akan diperbolehkan menjadi wali.

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Peraturan tersebut menjadi kabur atau bias dikarenakan patokan umur yang awalnya ada sekarang dihapus.

Narasumber

(Teo Briliyanto)



Wawancara Terhadap Penghulu Mengenai Peraturan Menteri Agama

Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Slamet S.H

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Mijen

Hari/tanggal : Senin, 15 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Mengenai PMA nomor 19 tahun 2018 tentang syarat wali nasab yang hanya tercantum *Baligh*, hal tersebut akan menimbulkan keraguan jika dilakukan oleh anak-anak dan menurut beliau mimpi basah sudah tidak bisa dijadikan patokan *Baligh* atau dewasa dikarenakan teknologi yang semakin canggih dan mudahnya seseorang untuk mengakses segala hal dengan mudah, sehingga proses anak untuk mimpi basah akan lebih cepat

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Guna menghindari keraguan beliau cenderung memilih angka tertinggi yaitu umur 21 tahun atau setara dengan umur mempelai pria.

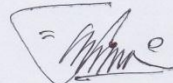
3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh* ?

Beliau mengidentifikasi dengan cara melihat keperawakan dan tingkah laku calon wali tersebut, jika dirasa layak maka calon wali tersebut berhak menjadi wali nikah

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Untuk dampak sendiri menurut beliau akan terjadi perbedaan penafsiran kata *baligh* antara penghulu satu dengan penghulu lain. Mesti masing-masing penghulu punya cara tersendiri dalam menentukan hal tersebut bahkan latar belakang penghulu tersebut dapat mempengaruhi keyakinan dalam menentukan baligh tersebut

Narasumber



(SLAMET S.H.)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMOWONO**

Jalan Makam Pahlawan Nomor 22 Kecamatan Sumowono kabupaten semarang 50662  
Telepon (0298) 713017 Email: kuasumowono.ungaran.mail@gmail.com;  
Website: www.kua-sumowono.blogspot.co.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 185/Kua.11.22.13/PW.01/09/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menerangkan bahwa telah datang ke kantor kami :

N a m a : **Ahmad Nafi'l Ihsan**  
Tempat.Tgl. Lahir : Grobogan, 25 September 1995  
NIM : 1502016086  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
Tempat tinggal : Ds. Sambirejo RT.02 RW.04 Putatnganten Kec. Karangrayung Kab. Grobogan

Bahwa yang bersangkutan telah datang beberapa kali untuk konsultasi dan wawancara perihal penelitian skripsi berjudul: "Studi Analisis Terhadap Pasal 11 PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Baligh Sebagai Syarat Wali Dalam Pernikahan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumowono, 24 September 2019



Kepala

**H. Choirul Anwar, S. Filil., M.S.I.**  
NIP. 197702152009121001

Wawancara Terhadap Penghulu Megenai Peraturan Menteri Agama  
Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Mohammad Hasan Bisri S.Hi  
Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Gunungpati  
Hari/tannggal : Senin, 16 juli 2019  
Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Mengenai syarat wali nikah, menurut beliau lebih enak ketika ada peraturan yang sudah ada umur pastinya yaitu pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 sekurang-kurangnya 19 tahun dikarenakan pengidentifikasinya relatif mudah dan jelas.

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Menurut beliau umur 19 tahun sudah dapat mpetanggung jawabkan pbuatannnya

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh*?

Dalam menentukan dengan cara melihat terlebih dahulu calon wali tersebut apakah dapat mempertanggungkan jawabankan pbuatannya atau tidak, meskipun belum 19 tahun asalkan dirasa layak menjadi wali nasab maka akan diperbolehkan menjadi wali nasab

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Peraturan penentuan usia wali menjadi tidak pasti dikarenakan hanya berdasarkan kira-kira



## Wawancara Terhadap Penghulu Mengenai Peraturan Menteri Agama

Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Ngadiono

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Ngaliyan

Hari/tanggal : Senin, 15 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Menurut beliau ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kondisi KUA setempat. Diantaranya adalah sebagai berikut: P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan), Pendaftaran Nikah maksimal 10 hari kerja, SIMKAH Online ( terlaksana namun ada kendala ), Pencetakan kartu nikah ( terlaksana namun belum menyeluruh ) dan Syarat wali nasab

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Guna menghindari keraguan beliau cenderung memilih angka tertinggi yaitu umur 21 tahun atau setara dengan umur mempelai pria.

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh*?

*baligh* menurut islam hanya ditentukan dengan mimpi basah bagi laki-laki. Jika terjadi sesuatu kasus anak atau adik dari mempelai wanita yang ingin menjadi wali nikah beralasan sudah mimpi basah, Bapak Ngadiono pribadi tidak berani menentukan apakah boleh atau tidak anak tersebut menjadi wali dalam pernikahan, beliau cenderung memilih wali hakim lah yang bertindak sebagai wali nikah dari pada anak tersebut.

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Untuk dampak paling utama menurut beliau adalah umur berapapun akan berkesempatan menjadi wali nikah asal sudah mimpi basah dan bagi penghulu akan timbul keraguan jika wali dilakukan oleh anak-anak.

Narasumber

(.....)

## Wawancara Terhadap Penghulu Mengenai Peraturan Menteri Agama

Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Slamet

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Mijen

Hari/tanggal : Senin, 15 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Mengenai PMA nomor 19 tahun 2018 tentang syarat wali nasab yang hanya tercantum *Baligh*, hal tersebut akan menimbulkan keraguan jika dilakukan oleh anak-anak dan menurut beliau mimpi basah sudah tidak bisa dijadikan patokan *Baligh* atau dewasa dikarenakan teknologi yang semakin canggih dan mudahnya seseorang untuk mengakses segala hal dengan mudah, sehingga proses anak untuk mimpi basah akan lebih cepat

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Guna menghindari keraguan beliau cenderung memilih angka tertinggi yaitu umur 21 tahun atau setara dengan umur mempelai pria.

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh* ?

Beliau mengidentifikasi dengan cara melihat keperawakan dan tingkah laku calon wali tersebut, jika dirasa layak maka calon wali tersebut berhak menjadi wali nikah

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Untuk dampaknya sendiri menurut beliau akan terjadi perbedaan penafsiran kata *baligh* antara penghulu satu dengan penghulu lain. Mesti masing-masing penghulu punya cara tersendiri dalam menentukan hal tersebut bahkan latar belakang penghulu

tersebut dapat mempengaruhi keyakinan dalam menentukan baligh tersebut

Narasumber

(.....)



## Wawancara Terhadap Penghulu Megenai Peraturan Menteri Agama

Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Mohammad Hasan Bisri S.Hi

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Gunungpati

Hari/tannggal : Senin, 16 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Mengenai syarat wali nikah, menurut beliau lebih enak ketika ada peraturan yang sudah ada umur pastinya yaitu pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 sekurang-kurangnya 19 tahun dikarenakan pengidentifikasinya relatif mudah dan jelas.

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Menurut beliau umur 19 tahun sudah dapat mempetanggung jawabkan pebuatannnya

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh*?

Dalam menentukan dengan cara melihat terlebih dahulu calon wali tersebut apakah dapat mempertanggungkan jawabankan pebuatannya atau tidak, meskipun belum 19 tahun asalkan dirasa layak menjadi wali nasab maka akan diperbolehkan menjadi wali nasab

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Peraturan penentuan usia wali menjadi tidak pasti dikarenakan hanya berdasarkan kira-kira

Narasumber

(.....)

## Wawancara Terhadap Penghulu Megenai Peraturan Menteri Agama

Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Teo Briliyanto S.Hi

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Barat

Hari/tannggal : Senin, 16 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Menurut beliau mengenai PMA nomor 19 tahun 2018 tentang syarat wali nikah bahwa sebaiknya pemerintah memberikan batas umur seperti peraturan sebelumnya PMA nomor 11 tahun 2007 dikarenakan di Indonesia sendiri banyak regulasi batas umur yang berbeda-beda sedangkan di fiqih islam cukup keluar air mani sudah dikatakan *Baligh*.

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Beliau cenderung setuju dengan peraturan sebelumnya yaitu ada batas umur 19 tahun.

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh* ?

Menurut beliau kemungkinan terjadi wali dibawah umur itu kecil, namun jika terjadi kasus seperti itu beliau cenderung melihat fisik terdahulu dan melihat tingkah laku dan berbicaranya, jika dirasa layak maka calon wali tersebut akan diperbolehkan menjadi wali.

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Peraturan tersebut menjadi kabur atau bias dikarenakan patokan umur yang awalnya ada sekarang dihapus.

Narasumber

(.....)

Wawancara Terhadap Penghulu Megenai Peraturan Menteri Agama  
Nomor 19 Tahun 2018

Nama : Bapak Choirul Anwar, S.Fil.I., M.S.I.

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Ungaran Barat

Hari/tannggal : Senin, 5 juli 2019

Aspek wawancara

1. Bagaimana pendapat para penghulu mengenai Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ?

Menurut beliau mengenai PMA nomor 19 tahun 2018 tentang syarat wali nikah bahwa belum sepenuhnya disosialisasikan mengenai pasal-pasal yang diganti atau pun yang ditambahkan ke semua KUA. Jika petugas KUA tersebut kurang aktif atau kurang teliti maka tidak akan menyadari perubahan didalam nya. Bisa jadi beberapa KUA masih menggunakan syarat wali nikah pada PMA Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 11 yaitu *Baligh* berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.

2. Menurut para penghulu berkisar umur berapa seseorang tersebut sudah dapat dikatakan dewasa atau sudah diperkenankan menjadi wali nikah?

Beliau cenderung setuju dengan peraturan sebelumnya dikarenakan pada peraturan sebelumnya tidak hanya baigh namun juga terdapat ketentuan kematangan atau *rusyd* yaitu umur 19 tahun. Dan 19 tahun menurut beliau sudah mewakili ukuran dewasa.

3. Bagaimana cara para penghulu dalam menentukan wali nasab dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pasal 11 poin 3 hanya *baligh* ?

Menurut beliau dengan ketentuan yang baru ini, dalam menentukan calon wali nikah harus *by kasus* masing-masing beda. Beliau cenderung ke perawakan calon wali tersebut. Jika dirasa mumpuni atau dapat bertanggung jawab maka diperbolehkan menjadi wali.

4. Apa dampak dari Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dalam menentukan wali nikah ?

Menurut beliau perubahan tersebut ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu peraturan tersebut menjadi longgar sehingga umur berapapun dapat menjadi wali. Sisi negatifnya dikarenakan adanya kelonggaran tersebut menyebabkan petugas KUA kebingungan dalam mengidentifikasi wali nikah tersebut Selain itu kemungkinan untuk berbohong itu ada jika hanya berdasarkan pengakuan

Narasumber

(.....)





PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCATATAN PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan perkawinan;

b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di



seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam.
2. Penghulu adalah pegawai negeri sipil sebagai pegawai pencatat perkawinan.
3. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang selanjutnya disingkat P4 adalah anggota masyarakat yang diangkat oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk membantu tugas Penghulu.
5. Akta Perkawinan adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan.
6. Buku Pencatatan Perkawinan adalah kutipan Akta Perkawinan.
7. Kartu Perkawinan adalah Buku Pencatatan Perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.
8. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
9. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
10. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

### Pasal 2

- (1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.



- (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. pendaftaran kehendak perkawinan;
  - b. pengumuman kehendak perkawinan;
  - c. pelaksanaan pencatatan perkawinan; dan
  - d. penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan.

## BAB II

### PENDAFTARAN KEHENDAK PERKAWINAN

#### Bagian Kesatu

##### Permohonan

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.
- (2) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
- (3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan Administratif

#### Pasal 4

Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. fotokopi akte kelahiran;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. fotokopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya.
- (3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan.
- (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
- (6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
- (7) Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4.
- (8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Bagian Keempat  
Penolakan Kehendak Perkawinan

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

BAB III

PENGUMUMAN KEHENDAK PERKAWINAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.
- (2) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.
- (4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan.



BAB IV  
PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
- (2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Rukun Perkawinan

Pasal 9

- (1) Akad dilaksanakan setelah memenuhi rukun perkawinan.
- (2) Rukun perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon suami;
  - b. calon istri;
  - c. wali;
  - d. dua orang saksi; dan
  - e. ijab qabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 10

- (1) Akad dihadiri calon suami dan calon istri.
- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, atau kepala kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.



- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. berakal; dan
  - e. adil.

## Paragraf 2

### Wali

#### Pasal 11

- (1) Wali terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. baligh;
  - d. berakal; dan
  - e. adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
  - a. bapak kandung;
  - b. kakek (bapak dari bapak);
  - c. bapak dari kakek (buyut);
  - d. saudara laki-laki seapak seibu;
  - e. saudara laki-laki seapak;
  - f. anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu;
  - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
  - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
  - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
  - j. anak paman seapak seibu;
  - k. anak paman seapak;
  - l. cucu paman seapak seibu;
  - m. cucu paman seapak;
  - n. paman bapak seapak seibu;

- o. paman bapak seapak;
  - p. anak paman bapak seapak seibu;
  - q. anak paman bapak seapak;
  - r. saudara laki-laki kandung kakek;
  - s. saudara laki-laki seapak kakek;
  - t. anak seapak seibu saudara kandung kakek; dan
  - u. anak saudara laki-laki seapak kakek.
- (4) Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
- a. wali nasab tidak ada;
  - b. walinya *adhal*;
  - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
  - d. walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; atau
  - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam.
- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.

- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

#### Paragraf 3

##### Saksi

#### Pasal 13

- (1) Akad dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. baligh;
  - d. berakal; dan
  - e. adil.

#### Paragraf 4

##### Ijab Qabul

#### Pasal 14

- (1) Ijab dalam akad dilakukan oleh wali.
- (2) Qabul dalam akad dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

#### Bagian Ketiga

##### Tempat Akad

#### Pasal 15

- (1) Tempat akad dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 16

- (1) Akad dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu yang mewilayahi tempat akad dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan akad dilaksanakan di daerah terdalam, terluar, dan di daerah perbatasan, Kepala KUA Kecamatan dapat menugaskan P4.
- (3) Akad yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi perkawinan dari Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu wilayah tempat tinggal masing-masing.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 17

- (1) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (2) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.

BAB V

PENYERAHAN BUKU PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 18

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan.
- (2) Buku Pencatatan Perkawinan diberikan kepada suami dan istri setelah proses akad selesai dilaksanakan.
- (3) Buku Pencatatan Perkawinan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kartu Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.



## BAB VI PERJANJIAN PERKAWINAN

### Pasal 19

- (1) Calon suami dan calon istri, pasangan pengantin, atau suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan Buku Pencatatan Perkawinan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB VII PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA PERKAWINAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 21

- (1) Administrasi pencatatan perkawinan dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis *online*.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan, administrasi pencatatan perkawinan dilakukan secara *offline*.

Bagian Kedua  
Pengesahan Perkawinan

Pasal 22

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau *isbat* dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama.
- (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan, pencatatan pengesahan perkawinan atau *isbat* dilakukan atas dasar:
  - a. surat permohonan yang bersangkutan;
  - b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan pengesahan perkawinan atau *isbat* pada KUA Kecamatan; dan
  - c. surat keterangan dari lurah/kepala desa tempat domisili pemohon.
- (3) Dalam hal pencatatan pengesahan perkawinan atau *isbat* yang dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu.

BAB VIII  
PERKAWINAN CAMPURAN

Bagian Kesatu  
Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan  
Warga Negara Asing

Pasal 23

- (1) Perkawinan campuran antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

#### Pasal 24

Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing:

- a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
- b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
- c. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- d. melampirkan fotokopi akta kelahiran;
- e. melampirkan akta cerai;
- f. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
- g. melampirkan fotokopi paspor;
- h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan
- i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

#### Bagian Kedua

##### Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing

#### Pasal 25

- (1) Perkawinan antarwarga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.
- (2) Persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;

- b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
- c. izin poligami dari pengadilan agama di Indonesia bagi warga negara asing yang akan berpoligami;
- d. melampirkan fotokopi akta kelahiran;
- e. melampirkan akta cerai;
- f. surat kematian bagi duda dan janda dari instansi yang berwenang negara calon pengantin;
- g. melampirkan fotokopi paspor;
- h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pengisian data pada Akta Perkawinan; dan
- i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah resmi.

## BAB IX

### PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

#### Pasal 26

- (1) Pencatatan perkawinan antarwarga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan/Penghulu, setelah memenuhi persyaratan:
  - a. surat pengantar dari lurah/kepala desa;
  - b. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - c. fotokopi kartu keluarga;
  - d. fotokopi akta kelahiran;



- e. rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan yang dilegalisasi oleh Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah; dan
- f. pasfoto berlatar belakang warna biru ukuran 2x3 (dua kali tiga) sebanyak 3 (tiga) lembar.

#### Pasal 27

- (1) Perkawinan warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar negeri selain yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat.
- (2) Bukti perkawinan yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 28

- (1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan perkawinan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti perkawinannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.
- (2) Pendaftaran bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Pencatatan Perkawinan/sertifikat perkawinan yang telah dilegalisasi oleh kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 29

Pendaftaran bukti perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada register perkawinan luar negeri.

## BAB X PENCATATAN RUJUK

### Pasal 30

- (1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.
- (2) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari lurah/kepala desa.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk di hadapan Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.
- (4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan.

### Pasal 31

- (1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan kutipan akta rujuk kepada suami dan istri.
- (2) Suami dan istri menyerahkan kutipan akta rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Pencatatan Perkawinan.

## BAB XI SARANA

### Pasal 32

- (1) Formulir pencatatan perkawinan terdiri atas:
  - a. pengantar perkawinan dari lurah/kepala desa;
  - b. permohonan kehendak perkawinan;
  - c. persetujuan kedua calon mempelai;
  - d. surat izin orang tua;

- e. penolakan kehendak perkawinan rujuk;
  - f. surat keterangan kematian;
  - g. pemeriksaan perkawinan;
  - h. pengumuman perkawinan;
  - i. rekomendasi perkawinan;
  - j. Akta Perkawinan;
  - k. Buku Pencatatan Perkawinan;
  - l. Kartu Perkawinan;
  - m. duplikat Buku Pencatatan Perkawinan;
  - n. pendaftaran bukti perkawinan luar negeri;
  - o. Akta Rujuk;
  - p. kutipan akta rujuk; dan
  - q. pemberitahuan rujuk.
- (2) Formulir perkawinan yang meliputi Akta Perkawinan, Buku Pencatatan Perkawinan, Kartu Perkawinan, duplikat Buku Pencatatan Perkawinan, dan pemeriksaan perkawinan, disediakan oleh Direktorat Jenderal.
  - (3) Surat pengantar perkawinan dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dikeluarkan oleh lurah/kepala desa.
  - (4) Formulir perkawinan selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.
  - (5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB XII

### TATA CARA PENULISAN

#### Pasal 33

- (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan perkawinan dan rujuk melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan.



- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 34

- (1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa.

### BAB XIII

#### PENERBITAN DUPLIKAT BUKU PENCATATAN PERKAWINAN

#### Pasal 35

- (1) Buku Pencatatan Perkawinan yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat.
- (2) Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (3) Penerbitan duplikat Buku Pencatatan Perkawinan karena kerusakan didasarkan surat permohonan yang bersangkutan disertai penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan asli.

## BAB XIV LEGALISASI

### Pasal 36

- (1) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan sudah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis *online* atau dapat memverifikasi data perkawinan secara *offline*, legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain dan/atau Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.
- (3) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dan pejabat pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.
- (4) Legalisasi surat status belum menikah/janda/duda untuk keperluan perkawinan dan atau keperluan lain di luar negeri, dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan dan pejabat pada Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.
- (5) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan pegawai pencatat perkawinan pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri dapat dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti perkawinan luar negeri.

### Pasal 37

- (1) Dalam hal KUA Kecamatan mengalami kejadian luar biasa atau *force majeure* yang menyebabkan Akta Perkawinan hilang atau rusak, legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan yang menerbitkan Buku Pencatatan Perkawinan.

- (2) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan melampirkan:
  - a. Buku Pencatatan Perkawinan asli;
  - b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa; dan
  - c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa perkawinan dicatat pada KUA Kecamatan dimaksud.

## BAB XV

### PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

#### Pasal 38

- (1) Kepala KUA Kecamatan membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Perkawinan apabila orang tersebut telah bercerai.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan membuat catatan dalam Akta Perkawinan terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Dalam hal perkawinan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan yang melakukan pencatatan perkawinan wajib memberitahukan peristiwa perkawinan tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan tempat terjadinya perkawinan terdahulu.



## BAB XVI PENGAMANAN DOKUMEN

### Pasal 40

- (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan penyimpanan dokumen pencatatan perkawinan dan rujuk.
- (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan elektronik.
- (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau gedung arsip khusus.
- (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan.
- (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.
- (6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan perkawinan dan rujuk yang disebabkan oleh kejadian luar biasa atau *force majeure*, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.

## BAB XVII SUPERVISI

### Pasal 41

- (1) Supervisi layanan pencatatan perkawinan dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.
- (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

## BAB XVIII

### PELAPORAN

#### Pasal 42

- (1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peristiwa perkawinan, meliputi:
    1. perkawinan di kantor dan luar kantor;
    2. rujuk;
    3. perkawinan campuran;
    4. usia perkawinan; dan
    5. pendidikan;
  - b. formulir perkawinan;
  - c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan
  - d. bimbingan perkawinan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan setiap bulan.



- (4) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang mengurus kepenghuluan setiap bulan.
- (5) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen perkawinan setiap bulan.
- (6) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

## BAB XIX

### SANKSI

#### Pasal 43

Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan pegawai pencatat perkawinan luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Semua teknis administratif terkait pencatatan pernikahan yang berlaku sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2018


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1153

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

  
Achmad Gunaryo  
NIP. 196208101991031003

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ahmad Nafii Ihsan  
NIM : 1502016086  
Tempat/ Tanggal Lahir : Grobogan, 25 September 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat asal : Dusun Sambirejo Rt 02 Rw 04 Desa Putat  
Nganten. Kecamatan Karang Rayung Kabupaten  
Grobogan  
No. HP : 081327561820 / 085959064603 (WA)  
Email : Ihsan.annafi96@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi (2001-2002)
2. SDN I Ginggang Tani (2002-2008)
3. Mts N Jeketro (2008-2011)
4. SMA Daarul Qur'an (2011-2014)
5. UIN Walisongo (2015-2019)

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia, menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Semarang, 18 Oktober 2019  
Yang membuat,

**Ahmad Nafii Ihsan**  
**1502016086**